

**PANDUAN PEMERIKSAAN KEBUTUHAN  
PEREMPUAN PEJUANG DALAM  
SITUASI KRISIS SOSIALEKOLOGIS**



# PANDUAN PEMERIKSAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN PEJUANG DALAM SITUASI KRISIS SOSIALEKOLOGIS

Disusun oleh:  
Anna Mariana  
Ciptaningrat Larastiti  
Noer Fauzi Rachman  
Siti Maimunah



Jl. Malabar no. 22, Bogor 16151

## Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Sajogyo Institute adalah lembaga yang bergerak dalam produksi dan layanan pengetahuan untuk kemajuan gerakan sosial dan perbaikan kebijakan agraria, dan pembangunan pedesaan di Indonesia melalui penelitian, pendidikan, pelatihan, dan advokasi kebijakan, dengan tujuan untuk membangun massa kritis dalam gerakan menegakkan keadilan agraria dan membangun kemandirian desa. Prof. Sajogyo merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, dengan keseluruhan bangunan rumah dan perpustakaan beserta isinya.

Dokumen ini dalam uji coba lapang belum diperkenankan untuk penyebarluasan dan penggandaan. Panduan ini akan difinalisasi pada bulan Juli 2015. Para peneliti akan menggunakan panduan ini saat turun lapang. Panduan ini dibuat untuk tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

ISBN digital : -

ISBN Cetak : -

Laporan penelitian ini menggambarkan pandangan penulis pribadi bukan pada kebijakan Sajogyo Institute. Penulislah yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi laporan penelitian ini.



Jl. Malabar no.22, Bogor 16151

Telepon/fax (0251) 8374048

Email : [sains.eksekutif@gmail.com](mailto:sains.eksekutif@gmail.com)

Situs : [http:// www.sajogyo-institute.or.id](http://www.sajogyo-institute.or.id)

# PENGANTAR

Konflik agraria yang muncul di bumi Nusantara saat ini bersifat kompleks, masif, dan berdimensi struktural. Hal yang patut dicatat dari konflik tersebut adalah kelahiran para perempuan di garda depan dalam upaya menghentikan pengrusakan tanah air mereka. Pertanyaannya kemudian, mengapa hal itu bisa terjadi? Siapa saja yang mengorganisir gerakan perempuan pejuang tersebut? Mengapa para perempuan menjadi garda terdepan dalam menentang perusakan yang dilakukan korporasi dan negara? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, salah satu upaya yang penting dilakukan adalah melakukan penelitian pemeriksaan (*assesment*) para perempuan pejuang di kawasan krisis sosial ekologis.

Buku ini merupakan panduan ringkas yang berisi metode dan tahapan untuk melakukan penelitian pemeriksaan atas kebutuhan perempuan pejuang. Asas dari buku panduan ini tidak lah mutlak sehingga harus dipraktikkan ketat. Sebagaimana tertuang dalam isi buku bahwa hakikat penelitian adalah kombinasi atas seni

menggali data sekaligus kemampuan menganalisis persoalan secara logis.

Kami memiliki tujuan —dalam penyusunan panduan— bahwa buku ini mampu memandu para pemeriksa agar tidak tersesat selama proses penelitian pemeriksaan. Berbekal buku panduan, para pemeriksa diharapkan lebih mudah menjalani proses penelitian secara baik, runut dan logis. Tujuannya agar para pemeriksa mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar para perempuan pejuang secara mendetil. Buku ini juga bertujuan untuk memberi gambaran mengenai strategi-strategi teknis dalam melakukan penelitian pemeriksaan yang singkat.

Demikian pengantar dari kami, semoga buku ringkas ini bermanfaat.

Yogyakarta-Bogor, Mei 2014

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISTILAH

Ekologi Politik  
Feminis

Pendekatan yang mengedepankan persoalan ekologi politik seperti penguasaan, akses serta kontrol sumberdaya alam dengan menambahkan variabel kelas, gender serta ras dalam analisisnya

Krisis Sosial  
Ekologis

Suatu krisis yang disebabkan oleh kekuatan struktural melalui negara dan korporasi untuk melakukan alih guna fungsi lahan melalui konsesi industri ekstraktif sehingga mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan.

Metode Etnografi

Metode etnografi merupakan metode kualitatif dengan teknik penggalian data melalui observasi, wawancara mendalam dan keterlibatan intim dengan mengutamakan pengalaman individu.

MP3EI

Master Plan Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Penelitian Pemeriksaan	Suatu proses yang mencoba memperkirakan potensi dan kekurangan yang dipunyai oleh suatu kelompok. Dalam proses itu terkandung cara/metoda pemeriksaan yang digunakan untuk memperkirakan situasi kekurangan yang dialami sekelompok, yang akan dilanjutkan dengan upaya menetapkan kebutuhan-kebutuhan belajar kelompok itu, dan mengusulkan kegiatan yang memenuhi kesenjangan-kesenjangan dan kekurang-cukupan mereka dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Perempuan Pejuang	Perempuan-perempuan di kampung yang memiliki potensi untuk berjuang dan bertahan bahkan melakukan aksi-aksi merespon ancaman terhadap ruang hidupnya.
Perempuan Pemimpin	Perempuan-perempuan yang berada di garis depan dan langsung berhadapan dengan negara dan korporasi yang menyebabkan krisis sosial ekologis.

---



# DAFTAR ISI

<b>TENTANG SAJOGYO INSTITUTE .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1   Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2   Merawat dan Memberdayakan Perempuan           Pejuang dalam Situasi Krisis Sosial           Ekologis.....</b>	<b>7</b>
2.1   Keperluan untuk Merawat dan Memberdayakan Perempuan Pejuang .....	8
2.2   Tantangan Perjuangan Perempuan dalam Situasi Krisis Sosial Ekologis.....	10
<b>BAB 3   Pemeriksaan Kebutuhan Untuk Merawat           dan Memberdayakan Perempuan Pejuang</b>	<b>17</b>
3.1.   Upaya Memahami Krisis Sosial Ekologi secara Bersama.....	19
3.2   Metode Etnografi dalam Pemeriksaan Kebutuhan Perempuan Pejuang .....	23

3.3 Tahapan Pemeriksaan.....	40
<b>BAB 4 Analisa Kebutuhan dan Mengusulkan Rancangan Kegiatan Untuk Merawat dan Memberdayakan Perempuan Pejuang ....</b>	<b>51</b>
4.1. Analisa Kebutuhan Belajar .....	53
4.2. Kebutuhan Mendorong Perempuan Pejuang Menjadi Pemimpin .....	57
<b>BAB 5 PELAPORAN .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB 6 TIPS DI LAPANG.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB 7 PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

## BAB 1

# PENDAHULUAN

Selama lima belas tahun terakhir, beragam kasus mempertahankan ruang hidup dari pengrusakan lingkungan oleh negara dan korporasi —kemudian disebut sebagai krisis sosial ekologi—telah memosisikan perempuan di garis depan. Mereka muncul di ruang publik untuk melakukan perlawanan dan memimpin komunitasnya. Hanya saja jumlah para Perempuan pemimpin ini belum cukup masif. Itu sebabnya, cerita tentang kepemimpinan perempuan belum mampu menjadi rujukan bagi masyarakat untuk merapatkan barisan, mengorganisir diri dan bertarung melawan kekuasaan kapital yang destruktif.

Meskipun narasi kepemimpinan perempuan masih terbatas, para perempuan pejuang ini tidak pernah berpangku tangan. Sejak akhir tahun 2014 hingga sekarang, ibu-ibu petani di Kabupaten Rembang rutin melakukan demonstrasi untuk menentang pendirian pabrik semen terbesar di pulau Jawa. Para ibu yang tangguh itu melakukan perlawanan dengan mendirikan tenda tepat di atas tapak peletakan batu pertama pabrik semen. Tanpa rasa takut,

para ibu berhadap-hadapan langsung dengan polisi pamong praja, polisi bahkan tentara yang sengaja dimobilisir pabrik semen dan pemerintah untuk mengusir mereka. Tujuan dari perlawanan adalah penghentian tambang pabrik semen di atas pegunungan kars yang berpotensi merusak 109 mata air, 49 gua, dan empat sungai bawah tanah dengan debit air tinggi serta menghancurkan beragam artefak sejarah.

<sup>1</sup> Perjuangan perempuan Rembang ini tidak hanya untuk menyelamatkan ekosistem mereka saja. Lebih dari itu, para ibu itu telah menyerukan solidaritas kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyelamatkan ruang hidup di Pulau Jawa dari ancaman industri ekstraktif. Solidaritas itu menyebar hingga menuai beragam aksi penolakan tambang semen di kota-kota Pulau Jawa hingga Sulawesi. <sup>2</sup>

Pelopop para perempuan yang berjuang di garis depan tidak hanya terjadi di Kabupaten Rembang. Sepenggal kisah dari Eva Bande (Syafei dan Rachman, akan terbit 2015), Rahmawati (Jatam Kaltim, 2015), Mardiana (WP Sains, 2015) hingga Mama Aleta (Maemunah, akan terbit 2015) memberi warna serupa tentang perempuan pejuang yang muncul di ranah publik. Kisah perempuan pejuang tanah air barangkali masih bersebaran di Indonesia dan seringkali luput dari pengamatan media massa ataupun diri kita

---

<sup>1</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/16/bentrok-aparat-vs-warga-di-rembang-satu-orang-luka-empat-ditangkap> (diunduh 9 Februari 2015).

<sup>2</sup><https://lawunhas.wordpress.com/2014/06/20/aksi-solidaritas-warga-makassar-menolak-tambang-rembang/> (diunduh 9 Februari 2015).

sendiri. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan berbagai pendekatan demi memahami perjuangan perempuan atas tanah airnya serta mendorong kelahiran perempuan pejuang di situs krisis sosial ekologis. Pendekatan itu mencakup tiga aspek ruang antara lain (1) praktik-praktik sosial dari perempuan dan komunitasnya, (2) perubahan ruang hidup para perempuan dan komunitasnya secara kolektif di berbagai lokalitas, (3) kehadiran atau ketidakhadiran perempuan dalam reorganisasi ruang yang telah, sedang atau akan dipraktikkan oleh berbagai kekuatan.

Pendekatan itu dibutuhkan untuk menyiapkan program yang mendorong tumbuh-kembang perempuan pejuang mulai dari tingkat kampung hingga kabupaten di berbagai situs krisis sosial ekologi. Selanjutnya, kami hendak membangun rombongan belajar perempuan pejuang yang kelak mampu saling merawat, mendukung, dan memajukan gerakannya. Tahapan paling awal untuk memulai program adalah penelitian pemeriksaan kebutuhan perempuan pejuang yang menjadi calon anggota rombongan belajar bersama. Penelitiannya sendiri berangkat dari pemahaman tentang penyingkiran perempuan pejuang di tengah situasi krisis sosial ekologis.

Secara sederhana, penelitian pemeriksaan kebutuhan bisa dipahami sebagai sebuah upaya untuk memperkirakan kekurangan yang dimiliki kelompok sosial tertentu. Upaya tersebut menyimpan metode pemeriksaan yang digunakan untuk memperkirakan kekurangan, kemudian

mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan belajar kelompok, kemudian mengusulkan kegiatan untuk memenuhi kesenjangan dan kekurangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Royse, 2009 : 3).

Penelitian pemeriksaan kebutuhan ini akan dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sistematis sebagai berikut:

- (1) Pemeriksa menggunakan metode yang tepat untuk memahami situasi krisis sosial ekologis para perempuan di berbagai situs mulai dari level kampung hingga kabupaten.
- (2) Pemeriksa mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal yang menjadi kebutuhan belajar perempuan pejuang, baik itu kebutuhan dari perspektif perempuan hingga kebutuhan aktual dari hasil penilaian pemeriksa.
- (3) Pemeriksa menganalisis situasi dan kebutuhan belajar perempuan pejuang sehingga mampu merumuskan tujuan yang akan dicapai bersama.
- (4) Pemeriksa menyusun rancangan program pembelajaran yang realistis untuk meningkatkan kemampuan para perempuan pejuang sekaligus kemampuan para pemeriksa.

Keempat tata cara tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.  
Skema Pemeriksaan Kebutuhan Perempuan Pejuang

Berdasarkan skema di atas, pemeriksa kebutuhan belajar perempuan pejuang perlu membekali diri dengan kecakapan dalam mengenali dan mengidentifikasi situasi-situasi khusus dari krisis sosial ekologis. Langkahnya bisa dimulai dari memahami perubahan ruang hidup perempuan akibat krisis sosial ekologis serta mengenali titik balik perempuan untuk bergerak sebagai seorang pemimpin. Tentu saja, para perempuan pejuang ini membutuhkan dorongan untuk melakukan analisa tentang, “Bagaimana menginisiasi perjuangan? Kira-kira, bagaimana rute perjalanan yang perlu ditempuh? Serta memetakan bagaimana status perjuangan perempuan saat ini?

Panduan ini disusun untuk memberikan arahan praktis sekaligus konseptual untuk menempuh keseluruhan proses itu. Bab berikutnya dalam buku ini mengurai beberapa alasan pokok mengenai urgensi untuk merawat dan menguatkan perempuan pejuang, tantangan pejuang perempuan dalam situs krisis sosial ekologi. Selanjutnya, pada bab tiga menjelaskan mengenai metode etnografi sebagai metode penelitian pemeriksaan kebutuhan perempuan pejuang, bab empat memaparkan tentang analisa kebutuhan perempuan pejuang serta penyusunan rancangan program; dan bab terakhir mengenai susunan laporan yang diharapkan.



## BAB 2

# **MERAWAT DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN PEJUANG DALAM SITUASI KRISIS SOSIAL EKOLOGIS**

Persoalan konflik agraria yang terus menerus muncul disebabkan, salah satunya, oleh kebijakan konsesi pemerintah yang merampas akses masyarakat atas sumberdaya alam. Masyarakat dibiarkan berjuang melawan berbagai korporasi di level komunitasnya untuk menahan laju industri ekstraktif yang memporakporandakan kehidupan mereka. Perjuangan mereka terkadang muncul, kadang tenggelam. Maka, penting untuk memetakan bagaimana seharusnya perjuangan masyarakat—terutama perjuangan perempuan— untuk terus muncul dalam mempertahankan tanah airnya. Pembahasan pada bagian ini akan fokus pada pentingnya kehadiran para perempuan pejuang, dan bagaimana merawat serta memberdayakan perempuan pejuang.

## **2.1 Keperluan untuk Merawat dan Memberdayakan Perempuan Pejuang**

Konsekuensi atas kehadiran berbagai konsesi industri ekstraktif adalah perusakan alam secara masif yang mengakibatkan penyempitan ruang hidup masyarakat terlebih kaum perempuan. Akumulasi kapital berlangsung terus menerus. Laju keuntungan menggusur sumber penghidupan, seperti air bersih untuk minum dan pangan untuk konsumsi keluarga, yang selama ini dikenal sebagai ruang domestik perempuan. Tak berlebihan memang bila syarat penting agar kapital terus terakumulasi adalah penyingkiran peran perempuan dan komunitasnya untuk tetap berada dalam keadaan pasrah, diam dan bodoh. Ruang-ruang untuk menceritakan krisis yang mereka alami juga dibungkam rapat-rapat, apalagi pengambilan keputusan politik yang memberi kesempatan untuk mengatakan tidak pada konsesi-konsesi itu. Ya, secara tegas bisa dikatakan bahwa akumulasi kapital berbanding terbalik dengan keadilan gender, bahkan kain memperparah posisi perempuan di tengah masyarakat.

Kehadiran perempuan pejuang di tengah perlawanan terhadap industri ekstraktif memang masih terbatas. Sekalipun para pelopornya ada, mereka menghadapi tantangan yang berat mulai dari teror halus, kekerasan fisik, hingga kriminalisasi. Aktivis perempuan yakni Eva Bande dipenjarakan karena memimpin perlawanan terhadap perkebunan kelapa sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS)

milik Murad Husain, seorang taipan sawit dari Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Eva Bande dituduh menghasut warga dan membakar aset perusahaan. Padahal sejak 1996, PT. KLS merampas lahan petani di Desa Piondo, Singkoyo, Moilong, Tou, Sindang Sari, Bukit Jaya dan desa lainnya seluas 7.000 hektar. Kebun sawit itu juga membabat sekitar 500 hektar Suaka Margasatwa Bangkiriang. Sementara Murad Husain yang telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2010, hingga kini tak pernah diproses lebih lanjut.<sup>3</sup> Pada Desember 2014, Eva Bande mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi sehingga dapat melanjutkan perjuangannya dalam mendorong reforma agraria dan penghentian kriminalisasi petani di Indonesia.

Kasus paling akhir adalah Rahmawati yang kehilangan anaknya akibat lubang tambang di Kalimantan Timur. Di minggu keempat Februari 2015, Rahmawati bersama suami dan anak bungsunya pergi ke Jakarta untuk melaporkan kematian anaknya dan delapan anak yang lain di lubang tambang batubara di Samarinda. Ia mulai bergerak dengan menggalang petisi yang didukung oleh 10.000 lebih penduduk Indonesia. Di Jakarta, keluarga itu menemui Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan hingga

---

<sup>3</sup><http://degorontalo.co/berjuang-bersama-petani-lawan-perusahaan-sawit-eva-bande-ditangkap/> (diunduh 9 Februari 2015).

Komnas HAM. Tuntutannya satu agar pemerintah segera menutup lubang-lubang tambang di Samarinda. <sup>4</sup>

Perjuangan perempuan pemimpin pada ilustrasi di atas masih jauh dari cukup. Memang, beberapa perempuan pemimpin berhasil meraih kursi anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur, tapi jumlah mereka tidak banyak. Salah satu contoh adalah Aleta Baun. Lebih dari dua puluh tahun ia memimpin perjuangan untuk menolak perusakan ruang hidup di Molo, Amanuban dan Amanatun.

Agar perjuangan Evan Bande, Aleta Baun dan Rahmawati berlipat ganda, maka perlu pendekatan yang serius dalam merawat dan memberdayakan perempuan pejuang. Narasi ini menjadi latar belakang supaya jumlah perempuan pejuang terus bertambah. Mereka harus berani mengungkapkan dan memperjuangkan pemikirannya untuk memimpin perlawanan dalam menyelamatkan ruang hidup.

## **2.2 Tantangan Perjuangan Perempuan dalam Situasi Krisis Sosial Ekologis**

Pemahaman mengenai keterkaitan erat antara gender dan pengelolaan sumberdaya alam masih jarang dipahami. Sumberdaya alam sebagai kebutuhan dasar manusia justru masuk dalam sirkuit kapital yang ekstraktif dan patriarkis

---

<sup>4</sup><http://www.walhi.or.id/ibu-rahmawati-serahkan-petisinya-ke-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutan.html> Diunduh 3 Maret 2015.

sehingga mengancam ruang hidup komunitas terutama kaum perempuan (Simatauw dkk., 2000: 33). Di banyak kasus, para perempuan ini dimiskinkan oleh komodifikasi sumber daya alam. Mereka menjadi terpuruk karena sumber-sumber alam yang menjadi domain perempuan dirampas. Bila terjebak pada sirkuit kapital, kerja upahan perempuan ditentukan oleh pemilik konsesi dan seringkali beresiko tinggi.

Ditengah situasi itu, para perempuan pejuang tidak hanya sulit untuk mengaktualisasikan dirinya, akses mereka terhadap sumber-sumber alam juga sengaja dipangkas. Lingkungan alam menjadi sumber daya dan komoditas dagang, sementara tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja upahan. Kerja-karya perempuan pun terancam dicurahkan untuk mendapatkan uang tunai lantaran sumber-sumber hidupnya diambil paksa oleh konsesi. Air harus beli karena sungai tercemari, pangan harus beli karena tidak ada tanah untuk bercocok tanam, obat-obatan juga harus beli lantaran hutan sudah habis.

Kala konsesi perusahaan tiba, ruang kehidupan manusia kian terancam. Contohnya, bila hutan berubah menjadi tanaman monokultur karena konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), hubungan perempuan dengan hutan tak lagi untuk menjaga kelangsungan hidup melainkan karena pencemaran lingkungan (Ramadhani Putri, 2014: 47-50). Sistem produksi komoditas dunia yang ekstraktif tak hanya melumpuhkan ruang domestik

dan produktif perempuan dalam keluarga, tetapi juga mengancam generasi petani di masa depan. Para generasi muda justru disiapkan oleh sistem pendidikan nasional maupun daerah agar diserap oleh pasar tenaga kerja teknis dari perusahaan-perusahaan. Tanah-tanah subur untuk pertanian keluarga dialihgunakan menjadi konsesi, sementara para petani dan calon petani didorong masuk dalam sirkuit kapital. Lebih ironis lagi bila anak-anak kecil yang lahir dari rahim para ibu justru meninggal di lubang-lubang tambang. Kekerasan struktural ini benar-benar tampak vulgar disini (Galtung, 1969; Farmer, 1996).

Kasus-kasus kekerasan struktural di sektor kehutanan tidak kurang jumlahnya. Hal ini terungkap melalui naskah-naskah etnografi dalam Inkuiri Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM tahun lalu. Data *Identifikasi Desa Dalam Kawasan Hutan 2007 dan 2009* yang dibuat Badan Litbang Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 31.957 desa berada di kawasan hutan, dan 71,06% diantaranya sangat bergantung pada sumber daya hutan. Dengan demikian, kerusakan alam berpotensi untuk menumbangkan korban yang tak terhitung banyaknya. Kematian putra kedua Rahmawati di lubang tambang batubara milik PT. Graha Benua Etam (GBE) di Sempaja Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur adalah satu kasus yang mencolok. Demikian pula dengan kasus Raihan, 10 tahun, pejalat kesembilan yang meninggal di lubang tambang di Kota Samarinda. Akhir tahun lalu,

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengumumkan bahwa telah terjadi sedikitnya 472 konflik agraria di penjuru Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar dan melibatkan lebih dari 105.887 Kepala Keluarga.

Situasi ini tidak terjadi begitu saja. Kebijakan ekonomi politik Indonesia telah menempatkan negara kepulauan ini sebagai sumber bahan mentah dunia, dan rakyatnya sebagai tenaga kerja upah murah. Hal ini sudah berlangsung sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, dan semakin kuat pada masa pemerintahan Orde Baru hingga pasca reformasi. Sejak 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan Master Plan Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berlaku hingga 2025. Mega proyek itu akan membawa Indonesia memasuki babak baru yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai komoditas sekaligus sirkulasi dari produksi komoditas global. Dalam pidatonya pada pertemuan CEO APEC, Nusa Dua, Bali 6 Oktober 2013, Presiden SBY bahkan mengibaratkan Indonesia sebagai perusahaan, dengan posisi dirinya sebagai “*Chief salesperson of Indonesia Inc.*”

MP3EI membagi kepulauan Indonesia dalam koridor-koridor ekonomi, yang di dalamnya terdapat kawasan ekonomi khusus, lokasi-lokasi industri, hingga proyek pembangunan infrastruktur ekonomi. Dengan menempatkan kepulauan Indonesia sebagai pabrik-pabrik untuk memproduksi sumberdaya mentah seperti gas

dan minyak bumi, kelapa sawit, kakao, nikel, batu-bara, bauksit, karet, bubur kertas dan kertas, kayu-lapis, dan lain-lainnya, pemerintah telah melanjutkan skema ekonomi kapitalistik yang dimulai pada masa kolonial. Cirinya adalah penguasaan tanah berskala luas oleh perusahaan pemegang konsesi dan rakyat petani sebagai tenaga kerja upahan. Kondisi ini kian memburuk dalam 15 tahun terakhir, karena politik desentralisasi melalui pemerintahan daerah. Sistem politik monopoli semakin kuat dan berubah menjadi arena oligarki politik dengan pelaku-pelaku yang sarat dengan catatan korupsi.

Pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, nasib MP3EI tak begitu jelas. Namun, pemerintah tidak mau membatalkannya, meski jelas-jelas bertentangan dengan Nawacita agenda prioritas Jokowi sepanjang 2014–2019. Berlanjut tidaknya proyek-proyek infrastruktur di bawah MP3EI masih dilakukan dengan kajian per proyek. Proyek terbesar, yakni Jembatan Selat Sunda sudah dibatalkan namun Waduk Jati Gede di Sumedang dilanjutkan. Proyek pembangunan jalan kereta api lintas Kalimantan belum jelas. Pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Jokowi-Jusuf tetap melanjutkan sistem perekonomian kapitalis yang terus mengancam keselamatan warga, menurunkan produktivitas rakyat, dan merusak fungsi alam. Krisis sosial ekologis semakin membesar dan meluas dengan situasi yang berbeda satu sama lain di tiap daerah.



Di Pulau Kalimantan, sejak industri kayu runtuh, angka pengerukan batubara justru meningkat dan berbanding terbalik dengan krisis sosial ekologis masyarakat. Di Kalimantan Timur, ijin tambang pada masa Orde Baru mencapai 118 buah (Muhammad dkk., 2007: 25)<sup>5</sup> dan meningkat tiga belas kali lipat pada masa desentralisasi menjadi 1488 Ijin Usaha Pertambangan (Jatam Kaltim, 2013). Pada 2009 - 2010, 53 - 55 persen produksi batubara Indonesia berasal dari produksi Kaltim (RAD-GRK Kaltim, 2012: 26).

Buku panduan ini memang tidak dimaksudkan untuk memperpanjang narasi krisis lantas meratapinya sebagai dampak dari kebijakan ekonomi politik agraria pemerintah. Lebih dari itu, buku panduan ini disusun untuk menggali pengalaman perempuan pejuang di berbagai kampung dalam menghadapi situasi riil atas krisis sosial ekologi di masing-masing situs. Harapannya, pengetahuan tentang perjuangan itu dapat mendorong perempuan pejuang lain di berbagai tempat yang terancam oleh aktivitas ekonomi korporasi maupun negara.

---

<sup>5</sup>Masing-masing adalah 69 ijin Kuasa Pertambangan (KP), 9 Ijin Kontrak Karya (KK) dan 40 ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)



## BAB 3

# **PEMERIKSAAN KEBUTUHAN UNTUK MERAWAT DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN PEJUANG**

Untuk menelusuri, mengenali, menaksir dan memeriksa kebutuhan para perempuan pejuang di tengah krisis sosial ekologis itu, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai metode pemeriksaan kebutuhan perempuan pemimpin. Langkah awal yang perlu dihayati sebelum memeriksa kebutuhan para perempuan pejuang adalah memahami situasi krisis sosial ekologis. Di tengah krisis, para perempuan memang cenderung mengalami penyingkiran ganda lantaran tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk reorganisasi ruang pada rencana ekstraksi sumberdaya alam. Ketersingkiran itu juga muncul melalui tanggung jawab domestik yang menampilkan ketergantungan perempuan terhadap alam baik untuk pangan, kecukupan air, tanaman obat-obatan, hingga kerajinan tangan. Pemahaman ini menjadi landasan

substansial untuk menumbuhkan kepekaan para pemeriksa kebutuhan perempuan pejuang dalam melihat krisis sosial ekologis.

Langkah kedua adalah menyepakati metode etnografi sebagai jalan untuk mengungkap kondisi-kondisi yang menjadi tantangan pelibatan perempuan pejuang dalam persoalan krisis sosial ekologis. Metode etnografi sengaja dipilih untuk memberi detail pada narasi perempuan di tengah masyarakat. Maka, penting untuk melakukan eksplorasi data melalui pengamatan dan wawancara, serta pelibatan dalam keseharian perempuan. Sebagai metode penelitian, etnografi juga menyoalkan soal penyajian data. Istilah ini dikenal sebagai representasi, atau teknik menarasikan dan menganalisis data. Maka, penting juga untuk berkaca pada studi etnografi tentang perempuan di tengah krisis sosial ekologis. Terutama berkaitan dengan bagaimana etnografi memosisikan perempuan sebagai subyek yang melihat perubahan lingkungan di sekitarnya.

Selain menjelaskan tentang metode penggalan data dan representasi, langkah terpenting selanjutnya adalah mengurai tahapan pemeriksaan. Langkah ini menjadi upaya untuk melakukan usulan program dalam merawat dan memberdayakan para perempuan pejuang di berbagai situs krisis sosial ekologi, mulai dari kampung-kampung hingga skala kabupaten. Pada gilirannya kita akan membentuk rombongan/jaringan pelajar dari para perempuan pejuang di berbagai tempat yang terus menerus

ditumbuh-kembangkan kemampuan kepemimpinannya melalui program belajar bersama.

### **3.1. Upaya Memahami Krisis Sosial Ekologi secara Bersama**

Langkah awal dalam proses pemeriksaan kebutuhan perempuan pejuang adalah memahami krisis sosial ekologi yang dialami oleh para perempuan. Artinya, kondisi yang diperiksa oleh para pemeriksa bukanlah sosok si perempuan pejuang melainkan kondisi yang mereka alami dan hadapi sehari-hari. Cara utama yang seyogyanya dilakukan pemeriksa adalah bertemu dan terlibat dengan keseharian para perempuan. Tujuannya tak lain untuk memiliki pengalaman yang sedekat mungkin ikut “merasakan” dan “mengalami” situasi para perempuan pejuang.

Kemampuan untuk “mengikuti pengalaman para perempuan pejuang” tidaklah lahir secara instan. Ada etika yang perlu diperhatikan pemeriksa dalam proses pelibatan aktif. *Pertama* adalah kejujuran. Artinya, pemeriksa memiliki kewajiban untuk berterus terang menyampaikan tujuan, proses dan berbagai rencana yang akan ditempuhnya. Maka, para perempuan pejuang memiliki hak untuk menyetujui atau menolak ketikutsertaannya. Seringkali, upaya mendapatkan persetujuan juga diselingi dengan dialog. Para perempuan pejuang akan menyampaikan beragam pertanyaan tentang latar belakang pemeriksa.

Maka, para pemeriksa juga perlu untuk membuka diri dengan menjawab pertanyaan tersebut. Namun, sekalipun para pemeriksa ini tidak mendapatkan persetujuan, bukan berarti mereka gagal menjalankan tugas.

Etika *kedua*, adalah membangun empati terhadap cara pandang, pilihan, praktik dan penilaian perempuan pejuang mengenai situasi krisis dalam rumah tangga dan komunitasnya. Kelak, ketika berada di lapangan, para pemeriksa ini akan berbenturan dengan berbagai nilai yang diyakini oleh informan. Tak kadang, benturan itu menjadi amat kompleks. “Bagaimana jika informan melakukan aktivitas yang ilegal di mata hukum, apakah saya harus mencatatnya?” (Spradley, 2007). Bila demikian, maka hal utama yang dilakukan oleh seorang pemeriksa adalah mengamankan hak-hak, kepentingan dan sensitivitas informan (Spradley, 2007: 53). Ketika mendapatkan persetujuan dari perempuan pejuang untuk mengikuti kehidupannya, maka etika *ketiga* yang perlu diikuti pemeriksa adalah menjaga privasi informan.

Dilandasi oleh ketiga etika itu, tim pemeriksa mulai bekerja dengan mengikuti kegiatan dan keseharian dari perempuan pejuang. Mereka mencoba untuk sedekat mungkin melakukan enkulturasi dari suasana budaya yang tidak mereka kenal (Spradley, 2007). Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengawali enkulturasi adalah mengenali lanskap di sekitar masyarakat. Hal ini penting untuk setidaknya mengetahui konsesi apa yang

mengakibatkan krisis sosial dan ekologis. Mengenalinya pun perlu kejelian, sebab pada beberapa kasus, konsesi industri ekstraktif legal ataupun ilegal kerap bersembunyi di balik rerimbunan pohon. Konsesi perkebunan ataupun tambang tidak begitu kentara ketika hanya dikenali dari pinggir jalan. Tak jarang, lokasi konsesi juga amat vulgar ditampilkan di pinggir akses jalan umum ataupun bibir sungai. Namun demikian prinsip yang perlu dipegang dalam mengenali lanskap adalah mencatat berbagai titik penting seperti sungai, bangunan, *camp* konsesi sawit atau tambang, kantor desa, rukun tetangga dalam RT dan sebagainya. Untuk lebih mudah, pencatataan itu juga bisa digambar dan kemudian menkonfirmasi kembali kepada masyarakat.

Titik berangkat dengan mengenali lanskap dan ruang pada situs-situs krisis sosial dan ekologis setidaknya dapat membantu pemeriksa menggiring pada narasi perubahan. Narasi itu bisa saja dimulai dengan membuka memori kolektif dari cerita nenek moyang tentang sejak kapan masyarakat hidup menetap di kampung. Cara lainnya adalah dengan menanyakan perubahan pengalaman individu dalam masyarakat tentang lanskap di sekitarnya. Apakah mereka mendapatkan keuntungan atau kerugian kala konsesi datang? Bila dihadapkan pada pertanyaan demikian, maka setiap orang memiliki pengalaman berbeda tentang lanskap dan perubahan lingkungannya.

Gagasan tentang lanskap itulah yang kemudian dipersenjatai dengan pengamatan atas keseharian hubungan lelaki dan perempuan. Apakah ada perbedaan yang mencolok antara lelaki dan perempuan dalam rangkap wilayah kerja di atas lanskap tertentu. Dengan demikian, penting juga agar pemeriksa memegang prinsip-prinsip dan pemahaman atas analisa gender guna menunjukkan pengalaman yang berbeda antara lelaki dan perempuan atas krisis. Berikut pemaparannya:

- (1) Kepekaan Gender, yaitu kemampuan si peneliti untuk memiliki kepekaan gender agar dalam mengali data mengenai persoalan gender dapat segera dideteksi dan tulisan yang akan dihadirkan tidak “buta gender”. Kemampuan memiliki kepekaan gender disini, memang tidak dapat dilepaskan dari kemampuan akademik, sekaligus “seni” dalam melakukan penelitian. Kemampuan sebagai *scholar* (akademik) akan didapatkan melalui proses belajar dalam *desk study*, atau *studi literatur*. Salah satunya adalah melalui metodologi etnografi-historis yang berperspektif ekologi politik feminis<sup>6</sup> sebagai kerangka

---

<sup>6</sup>Selama lebih dari tiga dekade, ekologi politik memberi ruang kritis untuk membedah persoalan distribusi sumber daya di Indonesia. Ranah kajian ini pun beragam, mulai menyoal perubahan relasi sosial, akses dan kontrol sumber daya (Bavington dkk. : 2004), menggugat rejim konservasi alam (Escobar, 1999) dan jasa ekosistem karbon (Howell, 2013). Pendekatan ini kian kompleks kala menaruh perhatian pada pengalaman gender antara lelaki dan perempuan. Kompleksitas itu kentara lantaran perspektif gender memberi pemahaman atas dampak rejim tenurial dan distribusi sumber daya yang



analisisnya. Untuk mengasah ketajaman dalam menggunakan perspektif ekologi politik feminis adalah dengan metode tutur perempuan, untuk membuat yang biasanya tidak nampak, yakni pengalaman perempuan sendiri, menjadi lebih terang benderang.<sup>7</sup>

- (2) Menguasai kata-kata kunci dalam melakukan penelitian. Penguasaan dimaksud berkaitan dengan tumbuh kembangnya perempuan pemimpin yang hidup di tengah krisis sosial ekologis termasuk persoalan tenurialnya.
- (3) Penelitian pemeriksaan kebutuhan belajar perempuan pejuang yang dilakukan menggunakan metode etnografi yang dibahas pada sub bab berikutnya.

### **3.2 Metode Etnografi dalam Pemeriksaan Kebutuhan Perempuan Pejuang**

Studi mengenai perempuan dalam krisis sosial ekologis, seperti penelitian pemeriksaan kebutuhan perempuan pejuang, memang memerlukan pendekatan

---

berbeda antara lelaki dan perempuan. Oleh karenanya, panduan ini disusun dengan menimbang pendekatan kritis ekologi politik feminis sebagai sarana untuk mencari visibilitas perempuan dalam perjuangan tanah air.

<sup>7</sup>Metode tutur perempuan adalah cara untuk menggali pengetahuan berdasarkan pada pengalaman perempuan yang biasanya seringkali tidak terlihat. Metode tutur perempuan ini, salah satunya, mampu mengungkapkan kejahatan berbasis gender pada peristiwa politik 1965-1966 sebagaimana yang dilaporkan oleh komnas perempuan. Lebih lanjut baca Komnas perempuan, *Kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis Gender: Mendengarkan Suara perempuan Korban Peristiwa 1965* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).

khusus agar lebih peka terhadap pembagian kerja berbasis gender. Kala berada di lapangan, seringkali peneliti terkecoh oleh banyak hal yang bisa dieksplorasi sehingga luput dengan penuturan perempuan. Padahal perempuan memiliki pengalaman yang berbeda dengan lelaki dalam menghadapi krisis di lingkungan mereka. Oleh karena itu, para pemeriksa membutuhkan metode pencarian data kualitatif yang memungkinkan mereka menjalin hubungan secara personal dengan informan. Dengan demikian, metode etnografi bisa dianggap sebagai metode yang pas lantaran mampu mendeskripsikan pengalaman keseharian secara mendetail. Metode inilah yang kemudian dipilih menjadi metode penelitian kualitatif untuk melakukan pemeriksaan kekurangan dan kebutuhan belajar perempuan. Pertanyaannya kemudian, etnografi seperti apa yang pas untuk melakukan penggalian data bersama para perempuan pejuang? Apakah ada kebutuhan khusus bagi para pemeriksa untuk melakukan sebuah pemeriksaan?

Di sini, metode etnografi diposisikan ke dalam tiga hal pokok. *Pertama*, metode etnografi dianggap sebagai metode pengumpulan data yang secara konseptual bergantung pada teori sosial yang diyakini peneliti. Semisal, hasil pengumpulan data dari peneliti yang menyakini teori fungsi pasti tidak akan sama dengan peneliti yang menyakini teori ekonomi politik. Para peneliti dari teori fungsi akan mengarahkan data etnografinya pada cerita tentang

organisasi sosial di satu tempat penelitian. Mereka melihat organisasi sosial di masyarakat seperti tubuh biologis manusia di mana setiap organ memiliki fungsi masing-masing yang cukup jelas dan bergerak harmonis seperti mesin. Kecenderungan seperti ini tentu menggelisahkan lantaran peneliti sosial melakukan observasi seperti peneliti biologi yang menggunakan mikroskop di laboratorium. Metode etnografi yang demikian tidak bisa lepas dari proses kolonisasi, ketika orang kulit putih mengamati dan menuliskan organisasi sosial orang kulit berwarna di belahan dunia selatan. Wolf (2010) menyindir peneliti yang demikian sebagai, “Orang Eropa melihat “Masyarakat tanpa sejarah.” Ia menyangsikan penggalian data yang didasari pada teorisasi yang menggelisahkan. “Jikalau memang berbagai tempat saling terhubung, mengapa kita harus menggagap bahwa masyarakat itu statis dan terputus dari latar sejarahnya (baca: kolonisasi)?” (Wolf, 2010: 04-05). Sindiran Wolf menjadi dasar bahwa metode etnografi tidak bisa ditempatkan sebagai metode yang mengurung masyarakat di dalam tempurung karena seyogyanya kita selalu berubah.

*Kedua*, metode etnografi dianggap sebagai sikap politik peneliti dan penulis yang berpihak pada narasi perempuan pejuang tanah air. Sikap ini didukung pula pada pemosisian awal bahwa sebagai metode pengumpulan data, metode etnografi mengasumsikan masyarakat selalu berubah dalam trajektori sejarahnya. Lewat cara

demikian, maka metode etnografi tidak menafikkan subyektifitas peneliti, dalam hal ini pemeriksa, atas segala hal yang mereka rasapi selama di lapangan. Keunggulan metode etnografi kemudian mampu mengungkap identitas subyek yang memuat banyak segi kehidupan mulai dari pengambilan keputusan, ketimpangan relasi sosial, intrik politik hingga gerakan perlawanan. Etnografi seyogyanya mampu menyajikan narasi peminggiran masyarakat *sub-altern* (Kartika, 2014).

*Ketiga*, metode etnografi sebagai metode pengumpulan data dan sikap politik peneliti haruslah mewujudkan mealui “penyajian tulisan”. Etnografi sebagai teknik penyajian tulisan diharapkan mampu menghadirkan narasi tentang bagaimana catatan-catatan lapang dan pengamatan dihadirkan dalam tulisan secara hidup dan “bernyawa”. Lihat narasi catatan lapang di bawah ini:

*“Siang yang sangat terik membuat kepalaku pening untuk sekadar menatap Sungai Katingan di sisi timur kampung. Rerimbunan pohon rotan dan karet di seberang sungai tak bisa membuat kampung Dayak ini terasa teduh. Tak hanya aku saja yang mengeluh panas, para ibu yang sedang memencok (membuat rujak buah) dan menginang juga berkali-kali berkata ‘balasut-balasut (panas-panas).’ Mama Fadli –si pemilik rumah tempat memencok- berkata padaku, ‘Masih mending kita di kampung, kalau jadi Indu (ibu) Ladan yang kerja sawitan (perkebunan sawit –red.) bisa tambah panas.’*

*Memang hutan, di sepanjang satu kilometer mengendarai motor, sudah dibuka untuk perkebunan sawit dengan konsesi seluas 11.250 hektar. Lebih dari 4500 hektar diantaranya sudah ditebang dan ditanami sawit. Tak terbayang, berapa luas perkebunan sawit itu. Aku sudah kesana kemarin (16 Mei 2013) dengan seorang kawan kecilku di desa, sejauh mata memandang hanya sawit. Walau demikian, tak semua warga kampung terserap menjadi buruh perkebunan. Seperti Mama Fadli, ia memilih tinggal di rumah dari pada menjadi buruh sawitan. Toh ia masih mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan membuka warung di rumah dan mengumpulkan karet dari petani karet yang lain.*

*Seperti saat itu, aku dan para ibu masih bisa duduk santai sembari menginang. Mulut para ibu mulai menguning karena buah pinang, daun sirih dan kapur yang dikunyah. Aku sendiri hanya berani merasakan pinang tanpa sirih dan kapur. Sensasi pedas dan getir buah pinang di mulut membuatku kesulitan terlibat dalam pembicaraan, aku hanya mendengar mereka mulai bergosip tentang Indu Ladan. Mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia disertai candaan berbahasa Dayak Ngaju yang lebih sering tak kumengerti. Mungkin mereka menghormati keberadaanku di tengah mereka makanya bergosip dengan bahasa Indonesia. Dari obrolan para ibu itulah, aku tahu, bahwa bagi mereka Indu Ladan sudah bekerja terlampau keras di perkebunan. Dibanding nelayan sungai, menjadi buruh borongan di perkebunan*

*sawit dianggap lebih melelahkan dan beresiko karena sewaktu-waktu bisa keracunan pupuk sawit, atau digigit ular. Menurut Mama Fadli, resiko itu harus ditanggung Indu Ladan karena kini ia sudah menjanda ditinggal suaminya pergi ke Banjarmasin dan tak kembali. Ditengah pembicaraan itu, aku hanya menatap wajah para ibu satu persatu. Beruntung, mereka dan aku masih bisa bercanda di kampung kala siang seterik ini. Aku pun menelan pinang itu getir.”*

*(Catatan lapangan, Katingan Kalimantan Tengah, Larastiti, 18 Mei 2013)*

Catatan lapangan di atas diperoleh peneliti dari pembicaraan intim bersama sekelompok perempuan. Dari kesempatan itu, peneliti bisa mengetahui dua pengalaman perempuan di tengah krisis akibat perkebunan sawit: Pengalaman perempuan sebagai buruh borongan, dan pengalaman perempuan bekerja di warung rumah atau nelayan. Mereka yang terjebak dalam pasar tenaga kerja perkebunan menjadi potret penyingkiran ganda. Cerita perempuan yang demikian bukanlah hal baru. Para peneliti sebelumnya sudah mengungkap persoalan mengenai penyingkiran itu sebelumnya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana penyajian tertulis dari etnografi tentang perempuan? Apa saja tema yang biasanya diangkat?

- (1) *Etnografi digunakan untuk menceritakan pengalaman perempuan akibat alih guna fungsi*

*lahan*. Di sini, ekologi politik dipahami sebagai kajian yang membongkar kekuatan politik dalam akses, manajemen dan transformasi sumber daya. Lantas, gender diletakkan sebagai *variable* kritis untuk melihat pengalaman berbeda lelaki dan perempuan tanpa harus terjebak pada pandangan esensialisme lewat metafora ibu bumi (Rocheleau dkk., 2005). Melalui pendekatan ekologi politik feminis ini, pengalaman perempuan Dayak Hibun digambarkan Julia dan White (2012) amat marjinal. Pengalaman itu antara lain, pengalaman berkaitan dengan hilangnya hak-hak tenurial perempuan karena diskriminasi program pemerintah pendataan kepala keluarga dan registrasi tanah atas nama kepala keluarga yakni suami. Pengalaman lainnya berkaitan dengan pembagian kerja yang *distingtif* antara lelaki dan perempuan semenjak kehadiran sawit, maka terjadi pula feminisasi pertanian skala kecil. Didalam rejim uang tunai, perempuan dianggap sebagai komplementer bagi suaminya. Oleh karenanya untuk menambah penghasilan, mereka pun bekerja sebagai tenaga kerja upahan dengan kerja remeh temeh namun beresiko tinggi seperti penyemprotan pestisida ataupun pemupukan. Itu sebabnya, Julia dan White (2012) menyebutkan pengalaman ketika bahwa terjadi kemunculan perempuan sebagai kelas tenaga kerja perkebunan. Mereka memegang peranan kunci

untuk mereproduksi tenaga kerja perkebunan sawit. Bila perempuan tidak bisa masuk dalam pasar tenaga kerja perkebunan sawit, maka pilihan satu-satunya untuk mendapatkan akses pada pendapatan tunai adalah melalui pengalaman kelima yakni pemulung *brondol*. Pekerjaan ini amatlah rentan dituduh ilegal dan sarat intimidasi dari keamanan perkebunan. Dari pengalaman itu, perubahan sumber daya tenurial menuju tanaman komoditas bernilai jual tinggi justru sarat dengan maskulinitas. Di sini perempuan absen atau dilalaikan dari diskusi politik dan negosiasi dengan korporasi. Seringkali terjadi, perempuan juga terjebak pada persoalan gender lain seperti kauntung-kantung prostitusi karena dihilangkannya otoritas perempuan atas lingkungannya.

- (2) *Etnografi mampu menceritakan gender sebagai kenyataan yang membentuk struktur sosial antara lelaki dan perempuan.* Narasi ini memunculkan pisau analisa dalam rangka mengurai hubungan kepemilikan, tata guna tanah dan perjuangan akses atas tanah atau sumber-sumber pendapatan lainnya (Siscawati dan Rahman, 2014). Konsesi-konsesi dari berbagai mekanisme penguasaan dan tata guna lahan oleh negara ini tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan hubungan kepemilikan dan sistem produksi masyarakat. Perempuan merespon bergantinya penguasaan hutan dari waktu ke



waktu dengan melakukan diferensiasi sumber mata pencaharian, dari sektor pertanian ke sektor nonagraris, misalnya berdagang di pasar, membuka warung, menyewakan rumahnya, dan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang pada gilirannya menambah beban perempuan sebagai pihak yang harus memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat.

- (3) *Etnografi juga bisa hadir untuk menjawab kegelisahan tentang rejim hijau yang juga memungkinkan terjadinya perampasan tanah dan akumulasi primitif (Kelly, 2011).* Etnografi jugabercerita tentang ketimbangan relasi produksi dan gender akibat gencarnya promosi komoditas dari biodiversitas asli oleh pihak konservasionis. Di sini West (2005) yang mengambil ilustrasi di Papua New Guinea memiliki nuansa marxisme kuat. Di sini West (2005) menggunakan analisa Marx tentang komoditi, di mana komoditi sesuatu yang memuaskan kebutuhan manusia sekaligus mengubah relasi sosial. Konservasi yang berbasis pada ekonomi neoliberal mengubah baik lingkungan dan relasi sosial ke dalam ranah komoditas. “Kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat *bilum?*” Perempuan Papua New Guinea tidaklah puas dengan proyek peningkatan pendapatan dari pihak konservasionis. Selain itu, pembuatan komoditas dari biodiversitas asli

seperti pembuatan handycraft tidak bertujuan untuk menciptakan pasar yang dekat dengan produsen. Tetapi pasar atas komoditas diciptakan jauh dari produsen sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Membuat *Bilum* adalah penanda kedewasaan bagi perempuan *Papua New Guinea*. Sekaligus material kultur yang amat dekat dengan keseharian mereka. Ibu memberikan bilum pada anak perempuannya. Kata ganti dari *Bilum* adalah *ko* yang artinya uterus tempat bayi sebelum akhirnya lahir. Ketika anak perempuan mereka melahirkan, para ibu akan membuatkan *billum* untuk menggendong bayi. *Billum* adalah manifesto dari pemberian, dan para ibu memproduksi *ko* mereka untuk diberikan pada anak perempuannya atau digunakan sendiri. Menurut West (2005) dengan dipengaruhinya analisa marxian, ketika *bilum* menjadi komoditas, maka tenaga kerja yang diinvestasikan untuk mengerjakan itu juga berubah. Pada akhirnya para perempuan ini beralih menjadi tenaga kerja bagi mereka yang mampu mengambil nilai lebih atas produk buatan mereka.

- (4) *Etnografi digunakan untuk melihat kerentanan perempuan ketika relasi gender itu berubah seiring perubahan percaturan distribusi akses dan kontrol sumber daya.* Contoh etnografi yang dimaksud ditulis oleh Julia (2014) yang menjelaskan bahwa

perempuan seringkali mengalami penyingkiran ganda atau disebutnya sebagai “eksklusi dua skala.” Eksklusi skala pertama terjadi lantaran perbedaan hak tenurial dan akses terhadap kepemilikan tanah antara perempuan dan lelaki melayu. Fenomena ini bisa juga disebut sebagai *intimate exclusion* di mana pengambilan keputusan atas pengorganisasian akses sumber daya tidak dipegang oleh perempuan. “Eksklusi skala kedua” didorong kuat oleh kebijakan pengelolaan sumber daya yang “buta gender”. Persoalan yang cukup jelas adalah rencana tata ruang yang tak melibatkan masyarakat. Demikian pula dengna berbagai rangkaian skema perijinan yang tak terbuka, dan sertifikasi atas kemitraan perkebunan sawit jarang mengakui kepemilikan kepala keluarga lelaki, membuat para perempuan ini ada dan tiada proses pengambilan keputusan politik atas sumber daya (Julia, 2014).

Keempat etnografi di atas secara spesifik menuturkan pengalaman perempuan kala menghadapi perubahan penguasaan atas akses dan kontrol sumber daya. Pengalaman ini pun dinarasikan dengan cara berbeda. Namun dapat ditarik benang merah, bahwa keempatnya mencoba untuk menuturkan perspektif perempuan dengan menghadirkannya subyek dan menuliskan keberatan mereka terhadap perubahan struktur tenurial dan sosial.

Dengan cara inilah maka, penelitian pemeriksaan ini peka terhadap ketimpangan gender yang tumpang tindih dengan ketimpangan struktural.

Empat tema itu bisa muncul melalui proses penelitian etnografi yang menyaratkan teknik tertentu. Sebab berbicara dengan para perempuan dalam realitas kultural tertentu dalam komunitas bukanlah sesuatu yang begitu saja mudah dilakukan. Terutama bila si peneliti memiliki tujuan untuk melakukan pemeriksaan kebutuhan belajar perempuan. Setidaknya ada dua teknik penggalian data yang digunakan untuk mendapatkan data yang kaya seperti rangkaian etnografi di atas. Teknik pertama adalah teknik menggunakan multi-sited etnografi dan teknik kedua adalah nocturnal etnografi.

- (1) Riset etnografi multi-situs (*Multisited ethnography*) didesain untuk memahami konjungtur ekonomi politik di mana etnografer melakukan kehadiran fisik (Marcus, 1995: 105). Etnografi multi-situs ini memang terlihat seperti “investigasi”. Kerja teknisnya sendiri dikategorikan dalam beberapa teknik yang tiga diantaranya relevan untuk memeriksa kebutuhan perempuan pejuang. *Pertama*, adalah *follow the people*. Penegrtian ini secara ringkas pemeriksa memfokuskan untuk mengikuti orang. Riset yang biasa dilakukan untuk membahas diaspora dan migrasi ini memiliki prosedur untuk tetap tinggal dan

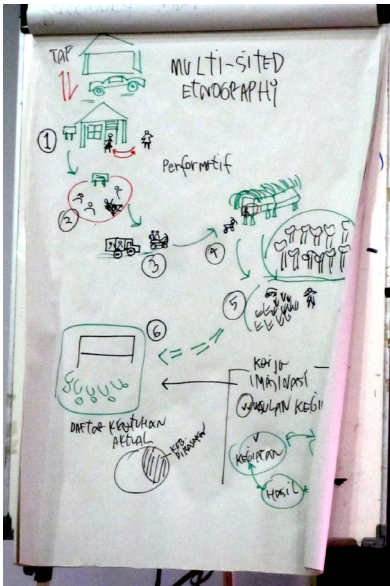
mengikuti berbagai perubahan atas subyek di lokasi berbeda (Marcus, 1995: 106).

*Kedua, adalah follow the thing* atau mengikuti barang, hadiah, komoditas, uang dan beragam obyek material. Kerja ini dilakukan dengan mengkonstruksi berbagai ruang untuk melacak sirkulasi atau rantai pendistribusian obyek material (Marcus, 1995: 107). Kajian ini barangkali menjadi kewajaran bagi etnografi dalam sistem perekonomian kapitalisme seperti cerita tentang rantai komoditas (*commodity chain*) baik yang diungkap oleh Bernstein (2010) maupun Ribot (1998).

*Ketiga, follow the conflict* atau mengikuti konflik. Teknik ini amat berkaitan dengan isu-isu yang saling berkontestasi antara hukum legal formal, hidup keseharian dan mungkin juga media massa. Ketiga teknik itu bisa saling terhubung satu sama lain, dan tidak bersifat distingtif. Oleh karenanya, panduan ini mencoba untuk mengurai bagaimana etnografi sebagai sebuah metode penelitian yang multi-situs itu dipraktikkan. Proses etnografi semacam ini tidak hanya merupakan metode yang menunjukkan untuk mencari data, tetapi juga menumbuhkan rasa peka para pemeriksa untuk menarasikan kelompok yang dipinggirkan (*sub-altern*).

Istilah etnografi yang identik dengan penelitian lapangan konvensional, yakni hidup selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di satu lokasi, patut

dipikirkan ulang. Persoalan substansial dari metode ini tidak terletak pada kerja lapangan yang lama, tetapi pada konsekuensi analitik yang hanya menjadi kedok bagi “preservasi adat istiadat” alih-alih membaca perubahan jaman (Marcus, 1995: 96). Oleh karenanya, bagi Marcus (1995) menawarkan etnografi multi-situs (*multi-sited ethnography*) yang tidak menjadikan lokasi penelitian sebagai kunci analisa yang melokal dan spesifik.



Gambar 2. Ilustrasi alur penelitian dengan pendekatan multisited ethnography

- (1) Performa yang dilakukan dalam melakukan multi-sited etnografi adalah dengan mengikuti manusia (*follow people*)
  - (2) Dari proses itu maka bisa diketahui pengalaman perempuan pejuang di kesehariannya. Apakah dia bekerja di ladang perkebunan atau pertambangan? Siapa saja yang ditemuinya? Bagaimana interaksi dengan orang yang ditemui? Apa saja yang dicakapkan?
  - (3) Dari identifikasi pengalaman perempuan pejuang itu, maka pemeriksa diharapkan mampu melakukan kerja-kerja imajinatif untuk mendata kebutuhan belajar perempuan yang aktual. Melalui proses itu, maka pemeriksa bisa bekerja untuk mengidentifikasi kegiatan.
- (2) Etnografi malam hari (*Nocturnal Ethnography*) menempatkan ruang hidup perempuan memiliki rute tersendiri yang harus dilihat secara istimewa. Untuk mendapatkan pengetahuan itu, pemeriksa harus jeli dan teliti pada momen apa, dan pada saat di mana bisa memiliki waktu yang tepat untuk berbincang dengan perempuan. Etnografi memberi ruang untuk mendapatkan cerita utuh mengenai perempuan. Etnografi ini dikenal dengan *nocturnal ethnography* (etnografi malam hari). Pengertian sederhana mengenai *nocturnal ethnografi* ini sangat penting

dilakukan untuk melihat daur hidup si perempuan. Salah satu indikasi keberhasilan dari proses etnografi nokturnal adalah pemeriksa dapat bercakap-cakap dengan si perempuan ketika di dalam dapurnya, karena aktivitas tersebut menunjukkan sudah tidak ada batas lagi, membaaur dengan pihak tineliti. Salah satu contoh tulisan yang menggunakan pendekatan *Nocturnal ethnography* adalah tulisan etnografi Makroman (Maimunah, 2015) mengenai hilangnya akses perempuan transmigran di Makroman akibat alih fungsi lahan menjadi wilayah tambang. Dalam memaparkan metode *nocturnal ethnography*, Maimunah menjelaskan sebagai berikut:

*“Ada satu masa dimana saya harus mengikuti Sukiyem berjalan di malam hari, karena dia mengikuti suaminya bekerja menjaga alat berat yang rusak di pinggir lubang tambang. Dan tugas menjaga alat itu hanya terjadi di malam hari saja, sehingga dia harus menginap di sana. Semula dia beralasan karena rasa kasihan kepada suaminya, tetapi belakangan (setelah 2-3 kali pertemuan) akhirnya dia bilang kalau dia tidak ikut suaminya, maka uang hasilnya tidak akan sampai kepada dia. Jadi sudah ada politik-politik yang dilakukan oleh perempuan. Kenapa pengamatan malam menjadi penting? Kerena malam hari menjadi jam yang intim dengan perempuan. Biasanya kita akan mencari waktu yang tepat, kapan*



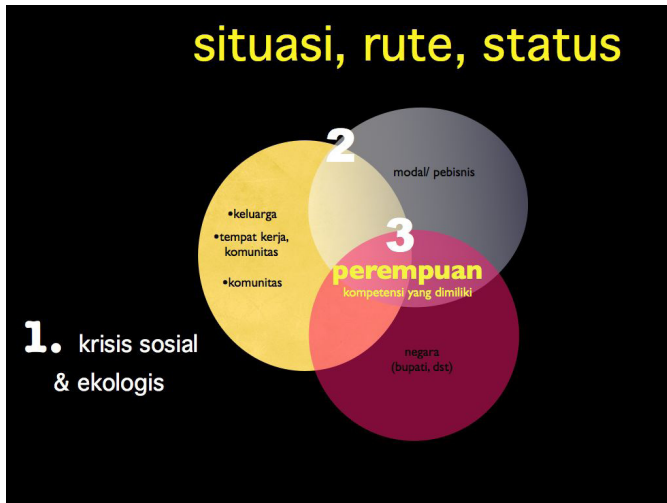
akan memulai pengamatan. Biasanya dia mulai dengan ritual membungkus nasi, membuat bekal untuk di sana. Kemudian ketika sampai di lokasi, dia akan menyiapkan sesajen dan meletakkannya di pojokan untuk diberikan kepada yang dia percaya sebagai “penunggu” di sana. Bayangkan jika suatu ketika kawasan itu hancur, dan dia masih percaya bahwa ada relasi-relasi di sekitarnya. Dan ini membuat saya merasakan bahwa masih ada harapan. Tetapi itu juga merupakan suatu pesan, karena kawasan itu sebenarnya adalah kawasan yang dikenalnya. Tetapi dia berkata bahwa kawasan itu sudah terasa asing baginya, tetapi dia meyakini bahwa masih ada yang datang ke sana (roh leluhur, penunggu, dan semacamnya). Karena ada beberapa kejadian yang memang agak aneh, tetapi tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Jadi di sana masih ada potensi-potensi untuk berbicara ikatan dengan wilayah itu, dan sebagainya. Pengalaman saya disana bersama Sukiyem dan suaminya, dan ini menjadi penting karena saya merasakan masuk di dalam ruang itu walaupun mungkin saya belum sepenuhnya merasakan apa yang dia rasakan. Dan saya merasa terhina dan tidak layak berada di situ. Dan di sana sangat bau sangit, dan ada dengung alat berat lewat. Jadi bayangkan betapa tidak terhormatnya saya sebagai petani dan kemudian di suruh menjaga alat berat. Saya sampai sekarang masih merasakan perasaan itu. Pagi, kita kembali menelusuri jalan antara lubang tambang satu dengan lainnya,

*dan harus menepi karena ada mobil perusahaan yang lewat. Itu menjadi penting bagi saya agar saya bisa ikut merasakan seperti apa krisis yang dialaminya.”*  
*(Notulensi Lokalatih pemeriksaan kebutuhan pejuang tanah air, 28 april 2015).*

### **3.3 Tahapan Pemeriksaan**

Pengalaman perempuan dalam krisis sosial ekologis seperti di atas merupakan sebuah proses yang dibentuk secara struktural oleh penguasaan ruang semenjak pemerintah kolonial hingga pemerintahan republik. Bilamana menyakini bahwa penyingkiran atas ruang hidup komunitas dibentuk oleh kontestasi penguasaan ruang, maka tidak bisa dinafikkan pula krisis sosial ekologis itu berjalan dinamis. Ekstraksi sumberdaya alam sudah dimulai sejak konsesi komoditas global pemerintah kolonial. Pun dengan perkebunan sawit yang dikenalkan pada abad 19 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sementara ekstraksi komoditas kayu mentah juga sudah dimulai sejak masa kolonial melalui industri kayu jati. Demikian pula dengan status kawasan hutan yang sudah dimulai sejak jaman kolonial. Berlanjut melalui pengaturan kawasan hutan untuk industri ekstraktif komoditas global semakin menguat pasca perundangan sektoral di tahun 1967 pada masa Orde Baru. Maka tak muluk-muluk bila perlawanan atas penguasaan ruang-ruang hidup menyebar. Rute perjuangan perempuan dan komunitas itu tidak bisa dilihat mendadak, namun harus

dipahami sebagai proses panjang. Krisis social ekologis yang panjang itu, kompetensi perempuan dibentuk oleh tiga ruang yakni negara, pemodal atau pasar, serta keluarga dan komunitasnya.



Gambar 3.  
Skema penelitian pemeriksaan perempuan pejuang

Setelah mengenal berbagai bentuk etnografi sebagai metode pemeriksaan, bagian ini menjelaskan tahapan-tahapan mengenai cara memulai pemeriksaan dengan etnografi tersebut. Di dalam pemeriksaan menggunakan etnografi, hal dasar yang harus diingkat adalah kehadiran pemeriksa di lapangan. Kalimat-kalimat yang akan

digunakan untuk menggambarkan situasi perempuan pejuang akan terlihat ketika pemeriksa menggunakan kata “Saya ada di sana”. Keterlibatan intim antara peneliti pemeriksa ini dengan perempuan pejuang haruslah sangat erat, meskipun di satu sisi perlu juga mengelola momen pada saat apa peneliti “masuk” ataupun “keluar” (*in and out*). Beragam cara serta tahapan itu dapat dimulai dengan mempelajari konteks historis serta situasi krisis sosial ekologi melalui *desk study* terlebih dahulu sebelum turun lapangan. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahapan penelitian pemeriksaan.

### **(1) Sosialisasi dan Pembentukan Tim**

Penelitian pemeriksaan kebutuhan dalam buku panduan ini adalah penelitian yang melibatkan kerja tim. Sebelum melakukan turun lapang, hal terpenting yang harus dilalui adalah membentuk tim pemeriksa yang solid. Salah satu unsur yang harus dimiliki anggota tim pemeriksa adalah menguasai pendekatan bagaimana memahami terjadinya krisis sosial ekologi dan analisis gender. Hal ini mutlak diperlukan karena situasi krisis sosial ekologis yang dihadapi perempuan pejuang ini tidak dapat dikenali apalagi dipahami tanpa menggunakan analisa gender dalam analisisnya.

**Output:** Terbentuk tim yang solid, paham analisa gender dalam pengelolaan sumberdaya alam.

## (2) Studi Literatur

Sebelum melakukan penelitian lapangan, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah *desk study*. Untuk memahami persoalan dengan argumentasi yang kuat, maka penting untuk melakukan kajian mengenai penelitian pendahulu. Dengan demikian kita bisa mengetahui kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Kontribusi bisa berupa perspektif baru, kritik teori, atau memunculkan teori baru atas suatu wilayah. Peneliti yang mampu berpijak pada penelitian sebelumnya akan memberi langkah penting dalam berargumentasi.

**Output:** anotasi bibliografi, *mapping* persoalan wilayah yang jadi tempat penelitian

## (3) Menentukan Kerangka Konseptual dan Metodologi

Setelah melakukan studi pustaka, tahapan kerangka konseptual akan lebih mudah dilakukan. Kerangka konseptual ini terdiri dari gagasan dalam pendekatan ekologi politik feminis. Pengertian ekologi politik feminis adalah pendekatan yang mengedepankan persoalan ekologi politik seperti penguasaan, akses serta kontrol sumberdaya alam dengan menambahkan variabel kelas, gender serta ras dalam analisisnya.

**Output:** Menyusun kerangka konseptual ekologi politik feminis

#### **(4) Lokalatih Tim pemeriksa**

Pada tahapan ini, pemeriksa akan dilatih melalui serangkaian lokalatih yang terdiri dari materi tentang persoalan krisis sosial ekologis, analisa gender sebagai pisau analisis serta pengenalan tokoh perempuan pejuang tanah air. Materi-materi ini akan menjadi bekal bagi tim pemeriksa agar mampu masuk ke ruang-ruang renegosiasi perempuan pejuang baik di lingkup keluarga, komunitas dan tingkat yang lebih luas dalam menghadapi krisis sosial ekologi.

Peserta lokalatih adalah pemeriksa yang akan dilatih untuk memeriksa persoalan menggunakan metode etnografi sehingga mampu memperoleh kisah perempuan pejuang tanah air hingga mengusulkan kebutuhan perempuan pejuang. Mereka akan membentuk tim yang solid melalui lokalatih. Selain itu, tim itu akan mendiskusikan pemahaman awal tentang krisis, karakter perempuan pemimpin, serta pisau analisa gender.

**Output** : Notulensi lokalatih

#### **(5) Pengumpulan informasi dan data lapang**

Tim Pemeriksa kebutuhan akan memasuki tahapan penelitian pemeriksaan kebutuhan yang akan dijelaskan berikut:

## A. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang melibatkan pengamatan langsung. Dalam melakukan observasi, seorang pemeriksa yang baik akan mengandalkan seluruh indera yang dimilikinya sebagai “alat” untuk “merekam” beragam hal. Beberapa momen mungkin tampak tidak ada artinya, padahal, misalnya, memiliki satu informasi kaya mengenai pembagian kerja berdasarkan gender. Seorang peneliti harus peka dengan pembagian peran gender di dalam suasana rumah, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan publik. Narasi dibawah ini merupakan contoh catatan lapangan yang berisi hasil observasi peneliti yang tak mengabaikan momen pejuang agraria yang tengah mengonsep sebuah acara untuk memperingati penembakan petani di Urutsewu Kabupaten Kebumen.

*“21.30*

*Setelah disuguhi makan malam oleh Pak Imam, kami memutuskan untuk mengunjungi rumah pak Seniman. Saat kami masuk ke rumah pak seniman, istrinya baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki dan merupakan anak keempat dari pasangan Pak seniman dan Sri Handajani. Masyarakat Urutsewu memiliki tradisi Muyi saat kelahiran bayi mereka. Tradisi Muyi, atau seringkali disebut ngedongan biasanya dilakukan selama 7 hari. Muyi, atau ngedong merupakan kegiatan berupa lek-lek-an, ngobrol satu sama lain, dengan sajian berupa*

*masakan basah yang disuguhkan kepada para tamu. Biasanya yang melakukan muyi tersebut adalah para bapak, tetangga sekitar rumah, atau bisa juga pada aparat desa, jika yang memiliki bayi tersebut adalah seorang tokoh di desa tersebut. Seperti pada malam itu, pak seniman bercerita karena kesibukannya saat ini yang akan mempersiapkan acara Arak-arakan budaya, juga pekerjaannya sebagai pengawas pemilu, maka sajian pada saat muyi ini ia hanya berupa makanan keringan, snack yang lebih mudah disajikan, dan bukan makanan kue-kue basah yang disiapkan oleh pribumi untuk para tamunya.”*

*(catatan lapangan, Urutsewu, Anna Mariana, 14 april 2014)*

Penggalan catatan lapangan diatas, dapat dijadikan contoh bagi pemeriksa. Catatan itu berisi informasi tentang pemimpin gerakan di Urutsewu yang sedang membuat rencana strategis untuk memperingati tragedi penembakan 16 April 2011 di rumahnya walaupun istrinya baru saja melahirkan. Tanggung jawab yang ditonjolkan oleh sang suami dengan mengambil alih seluruh tugas domestik, meski untuk sementara waktu, dapat menjadi informasi awal tentang bagaimana sebuah kepemimpinan gerakan sangat dipengaruhi oleh kondisi dukungan pihak keluarga satu sama lainnya. Sang istri sendiri adalah orang yang turut berjuang dalam melakukan pengorganisasian masyarakat.

**Output:** catatan observasi, catatan lapangan



## **B. Live in**

Tahapan berikutnya adalah turun lapang melalui *live in* atau secara sederhana bisa diartikan “tinggal bersama masyarakat”. Di dalam penelitian partisipatif, proses paling penting adalah pendokumentasian serta wawancara mendalam dengan menekankan metode bertutur perempuan. Adapun yang menjadi prinsip dasar dalam membangun relasi selama tinggal bersama ini adalah pendeknya jarak antara peneliti dengan subyek tineliti. Hubungan antara pemeriksa dan masyarakat harus didasari pada kehangatan dan kerendahhatian. Penting pula untuk menjaga etika dengan mengutarakan tujuan melakukan penelitian pemeriksaan.

**Output:** Wawancara mendalam (*indepth interview*)

## **C. Catatan lapang**

Menurut James Spradley (2005), catatan lapang tidak hanya berupa deskripsi wilayah saja. Lebih dari itu, ada beberapa jenis catatan lapangan yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian. Catatan lapangan itu bisa berupa 1) Catatan Ringkas, yaitu catatan yang ditulis pada saat kerja lapang dilakukan, dengan mencatat kata-kata kunci informan, dengan isi catatan menuliskan sesuai dengan dengan apa yang dikatakan oleh informan. 2) Catatan lapangan yang diperluas. Artinya adalah catatan keterangan informan yang tadi hanya berupa catatan ringkas, dikerjakan secara lebih mendetail, ketika pada

saat menadaptkan informasi dari informan kita tidak sempat melakukannya. Catatan lapangan yang diperluas ini bisa dikerjakan pada malam hari, saat peneliti beristirahat. 3) Jurnal Kerja Lapang, yaitu catatan yang berupa seperi buku harian, yang berisi pengalaman, kesan, ide, kebingungan, maupun pertanyaan. Jurnal ini merupakan cerita yang mengungkap sisi personal peneliti. Catatan Jurnal ini harus diberi keterangan tanggal berapa ia ditulis. 4) Catatan lapang berupa analisis dan interpretasi. Catatan lapangan ini tidak hanya hasil observasi maupun wawancara, bisa juga ditambahkan dengan konsep-konsep terkait dengan penelitian sehingga ada dialog dengan pengamatan hasil penelitian.<sup>8</sup>

**Output** : Catatan lapangan

#### **D. Dokumentasi**


Pendokumentasian adalah aktivitas yang harus segera dilakukan pada saat kita berada di lapangan. Proses ini akan memudahkan dalam “memanggil” data telah didokumentasikan. Banyaknya data yang dihasilkan berupa audio-visual, bila kita tidak jeli, justru akan membuat “kacau-balau” susunan data, serta kehilangan “mood” untuk melakukan verifikasi atas data yang kita hasilkan di lapangan. Berikut ini beberapa cara yang dapat digunakan

---

<sup>8</sup>Ahmad Nashih Luthfi, *Panduan mutu penelitian STPN*, Yogyakarta: pustaka Magnum, cf, James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 95-106.

untuk melakukan pendokumentasian dalam berbagai media. Kami kutip cara pendokumentasian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Luthfi (2006)


- Aturan penamaan file (*filig*) foto: nama fotografer, \_tttt-bb-hh, \_subyek, \_lokasi

 Raja Pattinggaloang, 2012-11-20, Senja Merapuh, Makassar


- Aturan penamaan file (*filig*) rekaman audio: nama pewawancara, \_tttt-bb-hh, \_nama yang diwawancarai, \_subyek wawancara, \_lokasi

 Valerina Hutagalung, 2009-10-01, Alfonso Soares, Alih Kuasa Tanah Adat, Merauke

- Aturan penamaan file (*filig*) rekaman video: nama video maker, \_tttt-bb-hh, \_subyek, \_lokasi

 Bedjo Santoso, 2010-01-16, Panen Kakao, Palu Sulteng

- Aturan penamaan file (*filig*) teks (artikel): nama peneliti/penulis, \_tahun, \_subyek

 Ben White, 2011, Hutan Lindung dan Spesiesnya versus Masyarakat Takterlindungi

- Aturan penamaan file (*filig*) teks (notulensi): penulis notulensi, \_tttt-bb-hh, \_notulensi, \_subyek, \_lokasi

 Lilakila, 2007-09-15, Notulensi, Diskusi Tanah Pasca Tambang, Pangkalpinang



## BAB 4

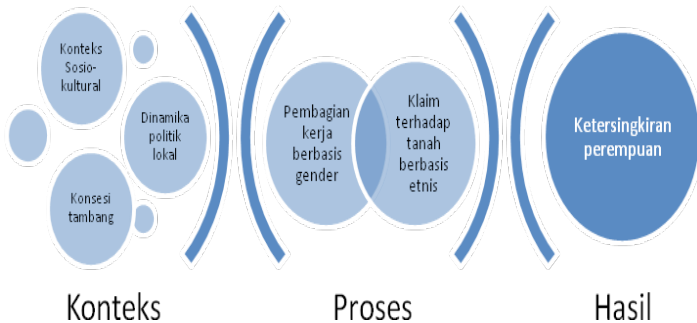
# **ANALISA KEBUTUHAN DAN MENGUSULKAN RANCANGAN KEGIATAN UNTUK MERAWAT DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN PEJUANG**

Pada saat di lapangan, para pemeriksa perlu memahami bahwa mereka akan bertemu dengan banyak perempuan yang terdomestikasi secara kultural dalam sosok ibu, istri dan anggota masyarakat. Tidak semua latar belakang sosial dan budaya mau menerima perempuan sebagai seorang pemimpin dalam berbagai level. Umumnya, perempuan yang berada di tengah krisis ekologi tidak serta merta dapat langsung terlihat. Oleh karena itu, pemeriksa harus sabar dan cermat dalam mengimajinasikan siapakah yang disebut perempuan pemimpin itu, lalu melihat dan menemukan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan perempuan pejuang untuk menjadi garda depan menggugat krisis ekologi di lingkungannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tahapan pemeriksaan kebutuhan perempuan pejuang

selanjutnya adalah tahap analisa. Pertanyaan utamanya adalah “Setelah mendapatkan data/ informasi, lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan?”

Berikut adalah salah satu contoh bagaimana cara menganalisis persoalan ketersingkirkan akses perempuan atas tanah di Kabupaten Kutai Kertanegara dengan fokus bagaimana relasi pekerjaan perempuan yang berubah sejak masuknya pertambangan di dua desa yang berbeda. Melalui pendekatan ekologi politik feminis, masuknya tambang ternyata mengubah cara hidup, pekerjaan, serta mengeluarkan perempuan, dari awalnya adalah sebagai pemilik tanah, pengelola alat produksi menjadi tenaga kerja (*labour*). Ketersingkirkan perempuan ini berupa akses atas tanah. Perempuan di desa Kertabhuana, harus menelan pahit kehilangan tanah yang dulunya adalah hasil perjuangan melalui skema transmigrasi, ketika datang tambang batubara masif beroperasi, mereka akhirnya, mau tidak mau, harus menjual murah kepada perusahaan. Begitu pula yang terjadi di Lung Anai, terancamkehilangan akses tanah, karena klaim adat atas tanah mereka dianggap tidak sah sebagai pemilik—padahal mereka sudah sejak tahun 60an berada disana. Penyingkirkan atas kepemilikan tanah berbasis etnis pun muncul menjadi salah satu sebab.

Dalam skema berikut dapat dilihat bagaimana pentingnya perspektif ekologi politik feminis dalam menganalisa persoalan akses atas tanah di dua desa kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur tersebut.



Gambar 4.

Sumber: Anna Mariana, Devy Dc dan Vegitya R. , “Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangan: Perjuangan Perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara”, laporan penelitian sistematis STPN, Yogyakarta, 2013.

Pembahasan pada bagian ini tentang bagaimana cara melakukan analisa atas temuan-temuan data/ informasi yang di dapat di lapangan. Selain itu, pada bagian ini akan dianalisis pula kebutuhan perempuan pejuang untuk berjejaring, melakukan pengorganisir sebagai bagian dari merawat dan memberdayakan perempuan pejuang tanah air-nya.

#### 4.1. Analisa Kebutuhan Belajar

Pemeriksa yang telah melakukan observasi, melakukan wawancara individu maupun kelompok, akan dihadapkan pada situasi dimana data, dokumen hingga

foto yang ia dapatkan dalam jumlah yang berlimpah. Untuk menganalisa kebutuhan perempuan pejuang, maka diperlukan tahapan langkah analisa atas data-data tersebut. Salah satu cara untuk melakukan analisa ini harus berdasarkan, nantinya, pada kebutuhan belajar perempuan pejuang tanah air. Langkah untuk melakukan analisa tersebut adalah melalui **Kategorisasi Data** atas tiga hal penting : 1) kategorisasi data konsesi yang membaca situasi krisis macam apa yang dihadapi oleh perempuan pejuang 2) kategorisasi data rute siapakah perempuan pejuang itu dan rute perjuangannya 3) Kategorisasi kebutuhan belajar perempuan pejuang.

Menganalisa kebutuhan para perempuan pejuang itu, dapat dilihat dalam berbagai tingkatan. *Pertama*, persoalan yang dihadapi oleh perempuan di tingkat keluarga. Pemeriksa harus jeli dalam melakukan kategorisasi data untuk mencari tahu mana data yang mampu menunjukkan problem apa saja yang harus dihadapi oleh seorang perempuan pemimpin itu mulai dari tingkat keluarga, komunitas atau tempat kerja hingga level masyarakat. Pemeriksa harus mampu mengungkap bagaimana relasi perempuan yang menjadi pejuang tanah airnya dengan keluarga.

Contoh untuk melakukan kategorisasi soal relasi perempuan di tingkat keluarga, pemeriksa dapat belajar dari tulisan Syafei (Syafei dan Rachman, akan terbit 2015) yang berkisah perjuangan Eva Bande dari perspektif suami



yang mendampingi perjuangannya. Dalam buku itu dapat dilihat, bahwa perjuangan seorang perempuan pemimpin dapat berhasil ketika relasi perempuan di tingkat keluarga, dapat berbagi peran secara setara. Kebutuhan perempuan pejuang dalam membangun pergerakannya, sangat dipengaruhi oleh kondisi kesetaraan di tingkat rumah tangga. Maka, pemeriksa harus menganalisa seperti apakah relasi perempuan mulai dari level di dalam keluarga, komunitas hingga tingkat publik luas (nasional maupun global).

*Kedua*, kebutuhan perempuan pejuang untuk mengenali krisis sosial ekologis per jenis konsesi. Kebutuhan ini diperlukan lantaran penyingkiran perempuan selalu terjadi dalam setiap keputusan pemberian konsesi estate untuk *commodity boom* di lingkungan mereka. Penyingkiran itu mula-mula terjadi karena proses adnistrasi perijinan yang praktis tidak dikenali oleh masyarakat. Ironisnya lagi, perijinan atas konsesi yang simpang siur itu juga diperparah dengan tumpang tindih status kawasan. McCarthy dkk. (2012) mengingatkan bahwa seringkali konsesi-konsesi proyek yang gagal juga mampu menciptakan kesempatan lain pada bentuk akusisi tanah lainnya. Salah satu kasusnya adalah eks-PLG. Berbagai skema hijau seperti minyak sawit, pangan dan karbon lahir dari ekspektasi tinggi atas komoditas sehingga membuka investasi baru dan akusisi tanah.

Dilandasi penyingkiran itulah maka penting untuk mengenali dan memahami jalur konsesi setiap perusahaan ekstraktif. Setidaknya mengetahui celah apa yang kerap

dilanggar para investor guna memuluskan lajur ekstraksi dan akumulasi keuntungan. Acap kali perlawanan atas akuisisi tanah terjadi karena ketidakjelasan pembagian keuntungan antara masyarakat dengan pemilik perusahaan (Borras dan Fransco, 2013).<sup>9</sup> Ketidakjelasan ini diawali karena ketidakpastian prosedur hukum atau dengan sengaja perusahaan itu melanggar prosedur hukum (Larastiti, 2015). Kebutuhan pengetahuan soal konsesi ini, menjadi analisa yang harus dilihat. Misalnya saja, dengan pengetahuan konsesi yang ada di lingkungan perempuan pejuang yang melakukan pelanggaran hukum maka tentu dapat menjadi celah bagi perempuan pemimpin untuk memperkarakan perusahaan. Namun bisa pula menjadi bumerang lantaran pelanggaran prosedur konsesi, seperti yang ditemukan Larastiti (2015) bahwa pengetahuan tentang konsesi ini acap kali diiringi dengan janji-janji pembagian keuntungan yang besar. Oleh karena itu kebutuhan untuk memahami jalur prosedural setiap konsesi perusahaan memang membutuhkan kejelian dari pemeriksa sebagai kebutuhan belajar para perempuan pemimpin.

---

<sup>9</sup>Pertama pengusiran orang tanpa penyerapan ke sektor produksi. Kedua, pengusiran orang disertai dengan penyerapan ke sektor produksi. Ketiga, pengusiran dan pemindahan seseorang ke tempat lain sehingga mereka bisa melanjutkan apa yang biasanya dikerjakan.

## **4.2. Kebutuhan Mendorong Perempuan Pejuang Menjadi Pemimpin**

Setelah melakukan kategorisasi data yang dilakukan, pemeriksa masuk pada tahapan mengidentifikasi, dan menumbuh kembangkan jalan apakah yang bisa ditempuh untuk perempuan pejuang dalam mengorganisir dirinya maupun masyarakat. Pemeriksa pada tahapan ini masuk pada menganalisa soal-soal berikut ini:

### **(1) Mengidentifikasi bagaimana kekuasaan bekerja dalam berbagai tingkatan**

Perempuan dihadapkan pada situasi yang selalu dipengaruhi oleh beragam kekuasaan yang bekerja. Mulai dari kekuasaan yang muncul di tingkat individu di tingkat rumah tangga hingga level politik ekologi tingkat lokal. Level individu harus mulai diidentifikasi mengenai kebutuhan perempuan melakukan negosiasi dengan keluarga. Pemeriksa harus mampu mengidentifikasi kekuasaan apa saja yang bisa menghambat seorang perempuan pemimpin dapat konsisten memperjuangkan keyakinannya. Perempuan yang memutuskan menjadi seorang pejuang tentunya ia harus sering meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, serta beban-beban pekerjaan di rumah tangga. Agar perjuangan perempuan dapat berjalan, maka pembagian kerja secara setara dengan pasangannya merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar. Perempuan yang berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin, harus

diberikan satu stimulasi ataupun pendidikan soal bagaimana kesetaraan bisa terwujud di tingkat keluarga, sehingga ia bisa menjadi seorang pemimpin

## **2) Siapa saja yang secara potensial bisa dilibatkan**

Pemeriksa dapat mulai mencari tahu, siapa sajakah dari para perempuan yang ditemui dalam penelitian tersebut, siapakan yang termasuk para perempuan pejuang, perempuan yang berpotensi menjadi pejuang, dan pemimpin perempuan pejuang. Perbedaan kategori ini akan membantu mendefinisikan, siapa yang menjadi pemimpin yang memerlukan kebutuhan belajar yang berbeda dengan perempuan yang berpotensi menjadi pemimpin. Sebagai contoh, seorang pemimpin pejuang agraria Aleta Baun, yang sudah sadar secara pribadi, saat ia melakukan pengorganisirasn masyarakat menolak tambang marmer, yang diperlukan bagi perjuangan Aleta Baun adalah membuat jaringan yang terhubung secara luas untuk menolak penambangan marmer di Mollo. Berbeda, misalnya, ketika memahami kebutuhan seorang perempuan pejuang yang baru saja muncul di ruang publik, maka pengetahuan yang diperlukan adalah soal membangun karakteristik seorang perempuan pejuang, cara mengorganisir diri, atau bahkan cara tampil dan mengungkapkan pendapat di muka umum.

### **(3) Identifikasi kebutuhan dan Program Intervensi**

Selain mengidentifikasi soal kekuasaan, dan siapa saja perempuan yang menjadi pemimpin, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah identifikasi kebutuhan dan program intervensi yang akan dijalankan untuk mendukung lahirnya para perempuan pejuang. Identifikasi kebutuhan itu dapat berwujud mengumpulkan hasil temuan dan mulai memikirkan persoalan-persoalan yang ada di desanya. Menemukan perempuan pejuang dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan atau intervensi apa untuk mendorongnya menjadi pemimpin. Bisa jadi kebutuhannya beragam. Misalnya Perempuan perlu didorong untuk membuat kelompok belajar untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mereka di tanah airnya. Jika pun kelompok tersebut belum ada, beragam cara bisa ditawarkan dengan mempertimbangkan potensi di lingkungan masing-masing. Pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas juga bisa dilakukan, pelatihan cara berorganisasi, membuat diskusi tentang persoalan yang mereka hadapi melalui pembentukan sanggar-sanggar desa. Sanggar-sanggar ini yang akan didorong tumbuh, dan diisi oleh para perempuan yang sudah diidentifikasi sebagai pemimpin tadi untuk menjadi rombongan belajar dari sanggar-sanggar desa tersebut. Melalui sanggar di desa-desa itu, nantinya akan terhubung menjadi sanggar tingkat kelurahan, dan tingkat kabupaten.

#### **(4) Menangkap Harapan Perempuan Pejuang**

Tak hanya potensi dan kekurangan, pemeriksaan juga perlu mendengarkan apa harapan para perempuan pejuang terhadap masa depan dirinya, keluarga maupun komunitas, atau harapan dalam skala yang lebih luas, pulau bahkan bangsa. Harapan atau mimpi atau cita-cita ini nantinya bisa menjadi “substansi” yang menjadi kekuatan yang bisa menghidupkan kelompok dalam sanggar-sanggar. Setelah sanggar-sanggar tersebut terbentuk, maka program yang akan dijalankan haruslah sesuai dengan yang disusun oleh para perempuan pejuang tersebut. Sehingga rute pengetahuan dari perempuan pejuang, oleh perempuan pejuang dan untuk masyarakat dapat terwujud. Peneliti harus mulai memetakan apa saja harapan dari para perempuan pejuang, sehingga pembentukan sanggar belajar itu dapat berlangsung secara konsisten, dan maju secara kualitas. Selain meningkatkan pemahaman kesetaraan gender di tingkat individu, namun diharapkan juga pemahaman soal kesetaraan dalam harapan dan juga cita-cita perempuan pemimpin.

## BAB 5

# PELAPORAN

Di dalam penelitian pemeriksaan kebutuhan belajar perempuan pejuang ini, para pemeriksa wajib untuk menyerahkan laporan di masing-masing desa sebanyak 36-40 halaman dengan spasi 1,5 dan format tulisan *times new roman* 12. Jumlah ini tidak termasuk dengan halaman judul, daftar pustaka, daftar peta dan tabel, daftar istilah, daftar isi, dan foto. Berikut alur substansi untuk pelaporan setiap pemeriksa:

Daftar Isi	
Abstrak (1 halaman)	
Istilah/Glossary	
Daftar Tabel	
Daftar Peta	
Bab 1. Pendahuluan (3-4 halaman)	a. <i>Latar belakang</i> , berisi alasan-alasan mengenai mengapa program pemeriksaan ini penting untuk kawasan tersebut, lokasi yang dipilih berkaitan dengan situasi desa,

	<p>ancaman-ancaman industri dan konversi lahan, serta mengapa pemeriksaan terhadap perempuan pejuang di lokasi ini menjadi penting.</p> <p><i>b. Lokasi Penelitian: Data Demografi, termasuk gambaran mayoritas penduduk, budaya, sosial dan ekonomi (mata pencaharian)</i></p> <p><i>c. Ruang Lingkup. Paparkan ruang lingkup pemeriksaan.</i></p> <p><i>d. Metode</i></p> <p><i>e. Tahapan Pelaksanaan</i></p> <p><i>f. Susunan Laporan</i></p>
<p>Bab 2. Situasi Krisis Sosial Ekologis (5-6 halaman)</p>	<p><i>a. Bagaimana reorganisasi spasial berjalan di kawasan tersebut. Apa dan bagaimanakah masalah-masalah yang dihadapi komunitas akibat terganggunya layanan alam, terganggunya</i></p> <p><i>b. produktivitas (bertani atau berproduksi lainnya) berkaitan dengan reorganisasi spasial di kawasan tersebut.</i></p> <p><i>c. Situasi krisis sosial ekologi khusus seperti apa yang dihadapi oleh para perempuan pejuang dan respon mereka (termasuk akses kontrol terhadap sumber daya, isu-isu gender seperti pembagian peran, beban kerja dan lainnya).</i></p> <p><i>d. Bagaimana pandangan-pandangan perempuan secara umum terhadap kebutuhan akses dan kontrol terhadap sumber daya, perjuangan tanah air dan para perempuan pejuang lainnya.</i></p>



<p>Bab 3. Pandangan tentang Kebutuhan dan Profil Perempuan Pejuang (10-15 halaman)</p>	<p>a. <i>Bagaimana profil-profil perempuan (situasi, rute, status) dalam krisis sosial ekologis, posisi dengan keluarga, dalam komunitas, negara, korporasi, serta kompetensi perempuan. Juga cita-cita jangka panjang yang mereka harapkan berkaitan dengan akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan kebutuhan dukungan bagi mereka untuk memperjuangkan hal tersebut.</i></p> <p>b. <i>Jumlah profil perempuan adalah 3 – 4 profil.</i></p> <p><i>3.1 Profil 1.....</i></p> <p><i>3.2 Profil 2 .....</i></p> <p><i>3.3. Profil 3.....</i></p> <p><i>3.4 Profil 4 .....</i></p>
<p>Bab 4. Kebutuhan- kebutuhan dan Usulan Belajar (7-8 halaman)</p>	<p>Apa saja kebutuhan-kebutuhan perempuan-perempuan pejuang untuk bertumbuh kembang menjadi perempuan pemimpin, dan mengapa pilihan-pilihan kebutuhan dan usulan-usulan yang disampaikan itu penting.</p> <p>a. <i>Kebutuhan Aktual (penguatan kapasitas komunikasi, negosiasi, jenis keterampilan, layanan hukum, pengetahuan, informasi dan lainnya)</i></p> <p>b. <i>Kebutuhan yang diharapkan. (Rentang skala kemampuan antara kebutuhan aktual dengan kebutuhan yang diharapkan, jika memungkinkan gambarkan secara terukur, untuk memudahkan)</i></p>

	<i>c. Usulan-usulan kegiatan penting dan mendesak dalam periode 3 tahun, sampaikan dalam skala tahun pertama, kedua dan ketiga.</i>
Bab 5. Kesimpulan (1 halaman)	
Daftar Pustaka	
Lampiran	

## BAB 6

# TIPS DI LAPANG

Ada banyak tantangan yang akan ditemui oleh tim pemeriksa dalam melakukan penelitian pemeriksaan kebutuhan perempuan pejuang tanah air. Salah satunya adalah kesulitan-kesulitan yang berasal dari relasi sosial antara peneliti dengan masyarakat, khususnya perempuan pejuang. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka bab ini menguraikan mengenai serangkaian tips melakukan proses penelitian yang dibatasi oleh waktu tertentu:

- (1) **Perkenalan** merupakan unsur pertama yang harus diperhatikan oleh peneliti pemeriksa. Saat membangun kesan pertama, hal yang perlu dibangun adalah percakapan dengan rasa nyaman. Peneliti harus bisa meyakinkan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat bukanlah ancaman. Mulailah dengan perkenalan baik secara personal maupun memperkenalkan secara langsung tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan selama satu minggu, dan proses melakukan wawancara tersebut.

(2) **Wawancara mendalam** dianggap sebagai langkah efektif untuk menggali informasi lisan tentang kondisi setempat, khususnya jika tidak tersedia informasi tertulis tentang lokasi penelitian. Ada beberapa jenis wawancara untuk proses penelitian pemeriksaan ini terstruktur dan semi terstruktur. Untuk kebutuhan yang terkait pemeriksaan ini, peneliti sangat disarankan untuk menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara jenis ini lebih fleksibel dan memungkinkan peneliti mendalami hal-hal tertentu yang muncul secara spontan dalam proses wawancara yang tidak akan diperoleh jika menggunakan wawancara terstruktur. Berikut adalah langkah dan tips praktis melakukan wawancara semi terstruktur:

- Sebelum mulai wawancara, siapkan pertanyaan-pertanyaan panduan. Pastikan bahwa pertanyaan yang Anda buat memungkinkan responden untuk memberikan lebih dari satu jawaban.
- Kesan pertama adalah penting dengan proses wawancara. Pastikan Anda siap. Mungkin Anda perlu membekali diri dengan kartu identitas, alat-alat tulis yang memadai, surat pengantar penelitian, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- Bangunlah kepercayaan dengan responden. Tunjukkan melalui perilaku yang santun

dan sopan. Gunakan pakaian yang pantas. Perkenalkan diri Anda dan tunjukkan surat resmi. Jelaskan bahwa Anda ingin wawancara. Jika responden kurang berkenan, lakukan penjadwalan ulang dan tawarkan waktu yang lebih cocok.

- Jelaskan tujuan penelitian dan informasi apa saja yang hendak digali melalui wawancara. Sebelum memulai wawancara, pastikan responden menyetujuinya. Persetujuan ini penting untuk memperjelas apakah informasi yang akan disampaikan responden bersifat rahasia atau tidak. Persetujuan juga penting untuk menunjukkan bahwa proses wawancara berlangsung secara sukarela. Responden boleh menghentikan wawancara jika terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dirasa sensitif baginya.
- Pastikan responden merasa nyaman selama wawancara berlangsung. Catatlah semua informasi yang disampaikannya. Sedapat mungkin gunakan tulisan untuk mencatat semua informasi, termasuk informasi yang bersifat non verbal. Hindari alat perekam untuk mengurangi kegagalan teknologi perekaman: baterai habis, peneliti lupa menekan tombol *record*, dan lain-lain yang serupa. Apabila pemeriksa tidak

mampu mencatat secara keseluruhan, maka pastikan pemeriksa mencatat hal-hal penting secara cepat. Detail tidak perlu untuk dituliskan dahulu.

- Ketika wawancara selesai, segera tuliskan secara lengkap informasi yang didapatkan pada saat wawancara, termasuk hasil pengamatan lingkungan sekitar pada saat wawancara dilakukan. Lakukan pencatatan ini sesegera mungkin sejauh ingatan Anda masih segar. (Sumber: <http://www.socialresearchmethods.net/kb/interview.php> ).

### (3) **Wawancara informal**

Selain proses wawancara yang bersifat formal, hal yang tak kalah penting untuk mendapatkan informasi adalah dengan wawancara informal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencairkan suasana dengan penduduk di desa. Pada malam hari pemeriksa bisa mengobrol dengan pemilik rumah yang ditempati. Metode wawancara informal ini bisa dipakai kapan saja dengan siapa saja. Metode ini sangat berguna khususnya untuk mendapat informasi dari kelompok yang terpinggirkan. Seorang perempuan tidak merasa yakin diwawancarai secara formal, tapi mungkin akan senang berdiskusi secara informal di ruang-ruang seperti depan televisi, dapur atau di teras rumah.

(4) **Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)** adalah metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan interaksi kelompok. Metode ini berguna untuk mendapatkan perspektif dan pandangan tentang interaksi sosial. Temuan FGD bisa langsung dikonfirmasi oleh orang lain pada saat itu juga. Berikut ini adalah langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, dan pasca FGD:

#### Persiapan FGD

- Persiapan FGD membutuhkan banyak waktu. Pilih peserta sesuai topik penelitian, undang mereka secara langsung untuk menghadiri diskusi.
- Pilihlah tempat diskusi yang relatif "netral" sehingga semua orang merasa nyaman untuk hadir dan menyatakan pendapat. Pilih ruangan yang cukup untuk menampung semua peserta. Jangan lakukan FGD di rumah kepala desa atau kepala dusun. Pertimbangkan juga memilih tempat yang relatif dekat dengan rumah para peserta. Memilih tempat pertemuan yang sudah biasa digunakan warga untuk berkumpul akan lebih baik bila anda ingin menyelenggarakan FGD untuk peserta dari kelompok warga itu.
- Jumlah peserta FGD umumnya berkisar 4-12 orang, namun FGD yang baik, diselenggarakan

tidak lebih dari 6-8 peserta saja. Jumlah peserta yang terlalu banyak akan menyulitkan pencatatan dan penggalian informasi.

- Pilihlah waktu FGD yang membuat mereka nyaman. Jangan mengharapkan sekelompok perempuan miskin atau laki-laki akan menghadiri FGD di pagi hari. Pemriksa harus mengenali dan mengetahui kapan waktu senggang para perempuan yang akan diundang untuk hadir di FGD. Pemeriksa harus mengikuti jadwal perempuan pejuang, dibandingkan dengan para perempuan pejuang yang mengikuti jadwal pemeriksa.
- Siapkan pertanyaan-pertanyaan panduan diskusi yang bersifat terbuka (*open ended*). Susunlah pertanyaan secara logis dan urutkan pertanyaan mulai dari pertanyaan umum ke pertanyaan spesifik. Hal-hal yang sensitif sebaiknya jangan ditanyakan dalam FGD, lebih cocok ditanyakan dalam wawancara mendalam.
- Penting untuk diperhatikan adalah pemeriksa harus mampu tampil sebagai seorang fasilitator. Ia harus hafal urutan susunan pertanyaan yang sudah dibuat. Hal ini dimaksudkan agar alur diskusi berjalan lancar, tidak kaku dan memudahkan penggalian informasi. Jika pemeriksa terus menerus bolak-balik membaca



daftar pertanyaan selama memfasilitasi proses diskusi, tentunya sangat tidak nyaman dan tidak terjadi diskusi yang menarik.

- Jangan melakukan FGD sendirian. Artinya, salsa seorang dari pemeriksa yang melakukan FGD harus mengajak rekan yang lain. Hal ini penting mengingat, ketika seorang pemeriksa menjadi fasilitator, ia tidak bisa sekaligus menjadi seorang notulen. Perlu pula untuk membagi tugas siapa yang mengajukan pertanyaan dan mengelola diskusi, dan siapa yang bekerja mencatat hasil diskusi.
- Jagalah kontak, hubungi kembali dan ingatkan peserta sehari sebelum pelaksanaan FGD. Mintalah agar mereka datang tepat waktu.
- Diskusi mungkin akan menghabiskan waktu cukup lama diselingi dengan istirahat sebentar. Siapkan kebutuhan makan dan minum secukupnya. Jika dipandang perlu alokasikan biaya pengganti transportasi bagi peserta.

#### Penyelenggaraan FGD

- Atur ruangan, meja, dan kursi sedemikian rupa sehingga setiap orang bisa duduk nyaman dan melihat sesama peserta. Atur pula tempat untuk minum teh, kopi dan makanan kecil.

- Berikan senyuman, sambutan, dan apresiasi kepada peserta yang datang. Ketika semua responden telah tiba, sesi diskusi bisa dimulai.
- Bukalah FGD dengan ucapan terima kasih, dan jelaskan tujuan diskusi. Tegaskan bahwa Anda akan menjamin kerahasiaan informasi. Pertahankan agar suasana diskusi tetap santai dan informal sehingga semua peserta leluasa untuk menyatakan pendapatnya.
- Jelaskan kepada peserta siapa Anda dan apa tujuan Anda mengundang mereka dalam pertemuan ini. Berikan waktu kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang dirasakan belum jelas tentang tujuan pertemuan dan maksud penelitian.
- Di awal pertemuan mulailah dengan pertanyaan ringan yang terkait dengan interes dan pekerjaan peserta sebelum Anda masuk ke pertanyaan pokok penelitian ini.
- Usahakan agar diskusi peserta tetap fokus ke inti masalah yang menjadi pokok penelitian ini dan kasus-kasus yang muncul di penelitian lapangan. Pada saat tertentu Anda harus berubah fungsi menjadi moderator yang memastikan setiap peserta mendapatkan waktu bicara.
- Apa saja yang harus ditulis oleh seorang *note taker* selama diskusi berlangsung? Catatlah

siapa yang hadir, aturan diskusi, dan siapa mengatakan apa untuk setiap pertanyaan. Catat juga suasana dan atmosfer diskusi, apakah peserta merasa malu dan gugup, misalnya, dan lain-lain.

- Catatlah topik-topik dan temuan utama FGD pada lembaran kertas besar berukuran plano. Kertas ini berfungsi sebagai referensi bagi peserta FGD sendiri, juga untuk memeriksa apakah Anda benar-benar mengerti informasi yang mereka berikan. Biasanya peserta menikmati melihat seorang fasilitator menulis catatan mereka pada sebuah lembaran kertas.
- Setelah semua pertanyaan penelitian terjawab, akhirlah FGD dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas keterlibatan dan informasi yang mereka berikan. Tekankan juga bahwa penelitian ini tidak dapat menjanjikan adanya bantuan baru atau perubahan secara langsung. Sampaikan bahwa informasi ini akan digunakan untuk membuat rekomendasi kepada berbagai pihak tentang bagaimana sebaiknya pendampingan atau program-program dirancang di kemudian hari.

## Pasca FGD

- Segera setelah selesai FGD, periksalah catatan Anda dan analisislah. Luangkan waktu khusus untuk ini. Cara Anda bertanya dan memfasilitasi proses FGD juga harus dikaji.
- Setelah itu, jangan menunggu. Segera tulis catatan yang lengkap dan rinci.

## BAB 7

# PENUTUP

Keseluruhan isi dari buku panduan ini merupakan ikhtiar untuk memaksimalkan proses dalam penelitian pemeriksaan kebutuhan belajar perempuan pejuang di situs-situs krisis sosial ekologis. Pada bab pertama, pemeriksa diajak untuk mengenali urgensi penelitian pemeriksaan kebutuhan belajar perempuan pejuang yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah perempuan pemimpin yang berani menantang kelaliman penguasaan sumberdaya. Pada bab dua, pemeriksa kembali diikutsertakan untuk menggali pengalaman-pengalaman para perempuan pemimpin yang tak pernah jauh dari tantangan dan ancaman besar. Elaborasi di dalam bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap adanya keterkaitan antara gender dengan pengelolaan sumber daya. Bab selanjutnya mulai membahas mengenai persoalan metode sebagai sebuah langkah politik.

Studi tentang komunitas yang mengalami krisis sosial ekologis membutuhkan keluwesan metodologis yang mampu mengakomodasi pengalaman personal. Metode tersebut tak

lain dan tak bukan adalah metode etnografi. Pada bab ini dijelaskan pula tentang apa itu etnografi, mengapa metode etnografi menjadi langkah politis serta bagaimana tahapan yang dibutuhkan untuk merawat dan memberdayakan perempuan pejuang? Bab keempat, pemeriksa diajak untuk menguji analisa atas temuan-temuan data/ informasi yang di dapat di lapangan. Selain itu, bab ini diharapkan mampu menganalisa kebutuhan perempuan pejuang untuk berjejaring, melakukan pengorganisiran sebagai bagian dari merawat dan memberdayakan perempuan pejuang tanah air-nya. Bab lima berisikan format pelaporan dan bab enam berisikan mengenai tips teknis selama berada di lapangan untuk melakukan eksplorasi data.

Buku ini memang dibuat dengan format buku saku agar mudah dibawa selama di lapangan dan dijadikan referensi penggalian data bagi para pemeriksa. Walau demikian, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Berbagai dinamika yang ditemui pemeriksa selama di lapangan, kelak bisa menjadi rujukan tambahan untuk membuat buku panduan ini semakin kaya. Oleh karenanya, buku ini seyogyanya masih menjadi panduan dinamis yang nantinya akan diwarnai oleh pengalaman-pengalaman perempuan pejuang serta para pemeriksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- De Koninck, Rudolphe., Bernard, Stephane., Bissonnette, Jean-Francois. 2011. "Agricultural Expansion: Focusing on Borneo" dalam *Borneo Transformed: Agricultural Expansion on the Southeast Asian Frontier*. Rudolphe De Koninck dkk (ed.). Singapore: Challenges of the Agrarian Transition in Soeutheast Asia (ChATSEA)
- Escobar, Arturo. 1999. "After Nature: Steps to An Anriessentialist Political Ecology" dalam *Current Anthropology* Vol. 40 No. 1 Hal. 1-30.
- Howell, Signe Lise. 2013. "Divide and Rule: Nature and Society in a Global Forest Programme" dalam *Anthropology and Nature*. Kirsten Hastrup (ed.). Routledge.
- Ito, Takeshi, Noer Fauzi Rachman dan Laksmi Savitri. 2014. "Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia" dalam *The Journal of Peasant Studies*.

- Julia. 2014. "Perempuan Melayu di Perkebunan Sawit Kalimantan Barat" dalam *Working Paper Sajogyo Institute* No. 20.
- Julia dan Ben White. 2014. "Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan" dalam *The Journal of Peasant Studies*, 39:3-4, 995-1016
- Kartika, Titiek. 2014. *Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Komnas perempuan, *Kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis Jender: Mendengarkan Suara perempuan Korban Peristiwa 1965*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, edisi ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Luthfi, Ahmad Nashih. *Panduan penelitian Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Magnum, 2013
- James P. Spradley, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Maimunah, Siti. 2015. *Molo, Pembangunan dan Perubahan Iklim*. Naskah draft dan belum terbit.
- Mariana, Anna, Devy DC, dan Vegitya R. Putri, "Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangan: Perjuangan Perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara", dalam Ahmad Nashih Luthfi (peny.),



*Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2013)*, Yogyakarta: PPPM STPN, 2013. ISBN: 978-602-7894-09-9

Marcus, George. 1995. "Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography" dalam *Annual Review Anthrology* 24.

McCarthy, John F. 2010. "Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatera" dalam *The Journal of Peasant Studies* Volume 37 Nomer 04, 821-850.

McCarthy, John F., Jacqueline A.C. Vel and Suraya Afiff. 2012 "Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands" dalam *The Journal of Peasant Studies* Vol. 39 No. 2 Hal 521-549.

Peluso, Nancy Lee., Christian Lund. 2011 "New frontiers of land control: Introduction" dalam *The Journal of Peasant Studies* Vol. 38 No. 4 Hal. 667-681

Ramadhani Putri, Vegitya. 2014. *Perempuan Hutan dan Reproduksi Ruang: Fokus Pada Hutan Tanaman Industri di Sumatera Selatan*. Working Paper Sajogyo Institute No. 13

Rocheleau, Dianne Barbara Thomas-Slayter, and Esther Wangari, "Gender and Environment : A feminist political ecology Perspective", dalam Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, and Esther

- Wangari (eds), *Feminist Political Ecology*, New York and London: Routledge, 1996.
- Siscawati, Mia dan Noer Fauzi Rahman. 2014. "Gender dan Politik Konsesi Agraria: Dimensi Gender dalam Mekanisme-Mekanisme Penguasaan Tanah, Perubahan Tata-Guna Tanah, dan Krisis Sosial-Ekologis dalam Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, Hutan Tanaman Industri, dan Restorasi Ekosistem" dalam *Working Paper Sajogyo Institute No. 12*
- Siscawati, Mia dan Avi Mahaningtyas, "Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan di Indonesia", makalah dalam seminar Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan di Indonesia, Kamis, 18 Oktober 2012. Bogor, hal. 3-5.
- Simatauw, Meentje, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono. 2001. *Gender dan Pengelolaan Sumberdaya Alam : Sebuah Panduan Analisis*, Kupang: PIKUL.
- Spradley, James P. *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Syafei, Muhammad dan Noer Fauzi Rachman. 2015. *Hukum yang Tidak Adil Bukan untuk Dipatuhi*. Naskah tulisan dan belum terbit.
- Tsing, L. Anna. 2005 *The Friction: An Ethnography of Global Connection*. New Jersey: Princenton University Press.

West, Paige. 2006. *Conservation Is Our Government Now: The Politics of Ecology in Papua New Guinea*. Durham dan London: Duke University Press.

Wolf, Eric. 2010. *Europe and People Without History*. University California Press.

### **Sumber Internet:**

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/16/bentrok- aparat-vs-warga-di-rembang-satu-orang-luka-empat- ditangkap> (diunduh 9 Februari 2015).

<https://lawunhas.wordpress.com/2014/06/20/aksi- solidaritas-warga-makassar-menolak-tambang- rembang/> (diunduh 9 Februari 2015).

<http://degorontalo.co/berjuang-bersama-petani-lawan- perusahaan-sawit-eva-bande-ditangkap/> (diunduh 9 Februari 2015).

<http://www.walhi.or.id/ibu-rahmawati-serahkan-petisinya- ke-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.html>  
Diunduh 3 Maret 2015